



**BNN PROVINSI
JAWA TENGAH**

*Indonesia
bersinar*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

#JatengBersinarPerangiNarkobabarengBareng

@BnnProvJateng | BNN Provinsi Jawa Tengah | BNN PROV JATENG | infobnn_prov_jawatengah | bnn.provinsi.jawatengah

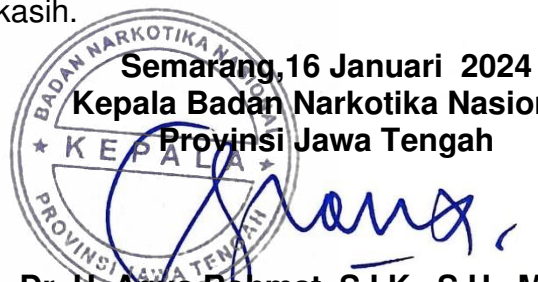
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat tersusun tepat waktu. Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicators*). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2023 yaitu yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan anggaran dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh staf, secara umum seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia, saya menyadari bahwa tantangan ke depan dalam upaya pelaksanaan P4GN ini semakin memerlukan upaya kerja keras dari seluruh personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN pada tahun mendatang. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Jawa Tengah

Dr. H. Agus Rohmat, S.I.K., S.H., M.Hum.

IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan unit eselon II mandiri yang berkedudukan di Provinsi yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Realisasi target kinerja ditetapkan melalui Sasaran Strategis:

- 1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.**
- 2. Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional, Produktif, dan Proporsional serta berkinerja tinggi.**

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama secara ringkas dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran tahun 2023 sebesar Rp.36.043.657.678,- atau sebesar 99.531%;
2. Dari 19 Indikator Kinerja Kegiatan, sebanyak 8 melebihi target, 10 sesuai dengan target dan 3 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan;
3. Sisa anggaran merupakan efisiensi dari Belanja Barang dan Belanja Pegawai.
4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Penyelarasan jadwal kegiatan dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - b. Membagi kewenangan dengan membuat Zonasi P4GN bagi BNNK untuk mengampu Kota/Kabupaten terdekat;
 - c. Melaksanakan distribusi tugas lintas seksi untuk menciptakan tim kerja yang solid di setiap Bagian/Bidang di lingkungan BNNP Jawa Tengah;
 - d. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
 - g. Optimalisasi Pendidikan pelatihan bagi personil BNNP Jawa Tengah;
 - h. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis teknologi sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN LAPORAN KINERJA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERJANJIAN KINERJA	7
A. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Analisis Capaian Sasaran	10
B. Akuntabilitas Keuangan	61
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNN Provinsi bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif didaerah Program Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN dan Advokasi, Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif, sementara Bidang Rehabilitasi melakukan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba serta Pascarehabilitasi Penyalahguna Narkoba.

Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Alami, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sintetis, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor, Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran dan Pengawasan dan Perawatan Tahanan,

Barang Bukti, dan Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika serta Pengelolaan Aset.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja eselon II mandiri yang berada di wilayah, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, tugas dan fungsinya, Laporan pertanggungjawaban dimaksud dinamakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini akan menjelaskan dan menggambarkan kinerja atau hasil yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun anggaran terkait dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan ditetapkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya RKT tersebut dikukuhkan dalam satu dokumen perjanjian kinerja antara Pengguna Anggaran (PA) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Penanggungjawab kegiatan.

Laporan realisasi dan capaian target setidaknya menggambarkan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja. Penyajian tingkat keberhasilan dan kegagalan unit kerja diuraikan secara gamblang, agar penerima manfaat dapat mengetahui sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan. Keberhasilan atau kegagalan mencapai target diuraikan agar penerima manfaat dapat mengetahui adanya faktor pendorong dan penghambat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada BNNK;
- d. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan program dan anggaran BNNP;
- f. Pelaksanaan administrasi.

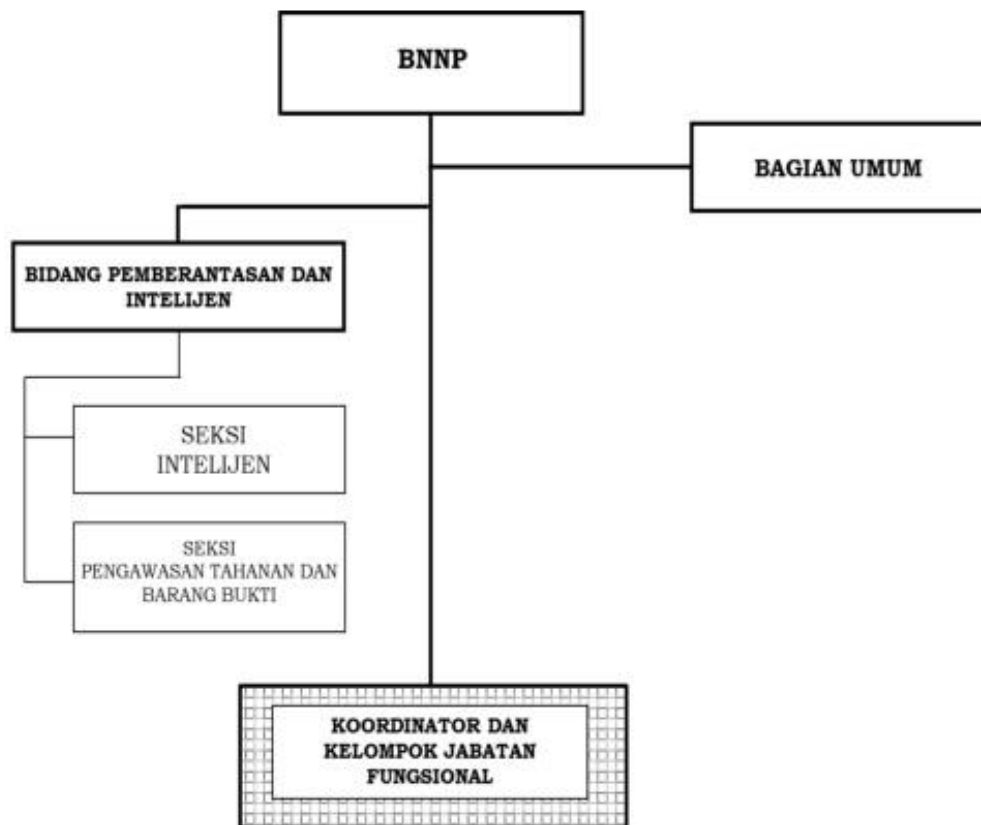
4. Kewenangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi.

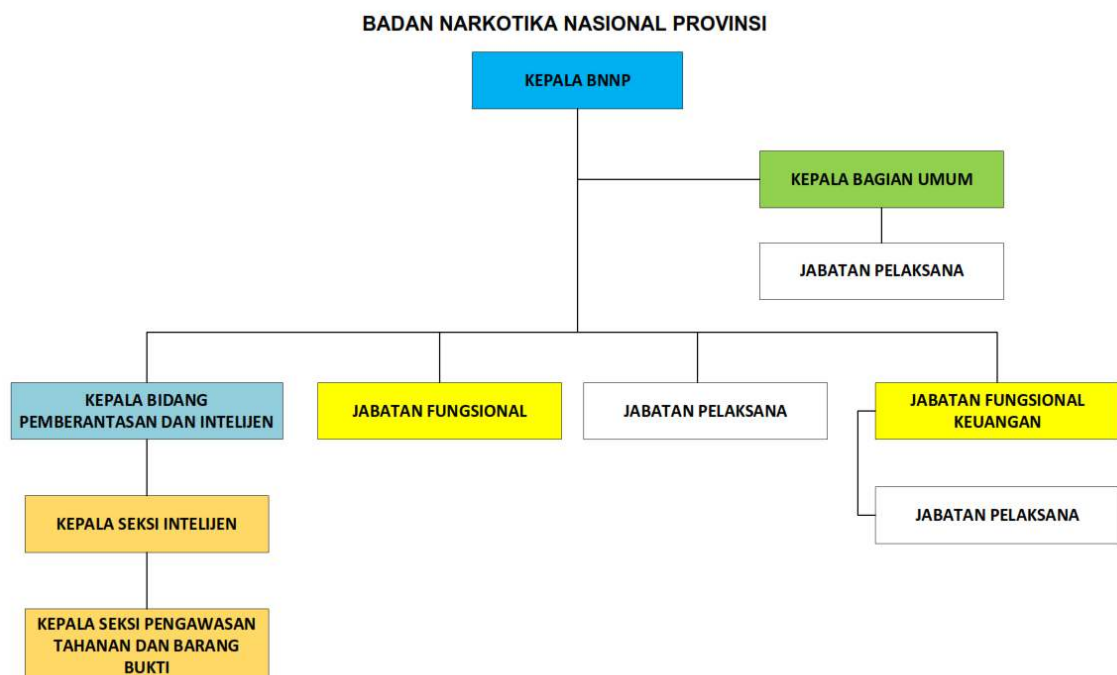
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Gambar 1.1 diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1. Kepala;
- 2. Bagian Umum;
- 3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi BNN Provinsi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:KEP/175/II/KA/KP.07.00//2022/BNN tanggal 15 Februari 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional di Badan Narkotika Nasional Provinsi Peta Jabatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Peta Jabatan BNN Provinsi

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNNP Jawa Tengah, antara lain Gambaran Umum, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan tentang Rencana Strategis/Rencana Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas tentang penetapan kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan analisis pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

Bab IV Penutup

Bab V Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan kontrak kinerja pimpinan unit kerja dengan memperhatikan penetapan kinerja yang berisikan atas sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai. Dijelaskan dalam variabel Perjanjian Kinerja:

b. Sasaran kegiatan

Produk akhir (keluaran akhir) yang dihasilkan dari serangkaian proses yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran program.

c. Indikator kinerja kegiatan

Alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

d. Target kinerja

Menunjukkan tingkat indikator kinerja sasaran kegiatan.

Atas dasar variabel tersebut di atas Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/ Kota
2		Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten/ Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		dan peredaran gelap narkoba		
3		Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/ Kota
4		Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,25 Indeks
5		Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63 %
6		Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100 Orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	8 Orang
7		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	20 Unit
8		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,34 Indeks
9		Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10		Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas Perkara
11		Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
12		Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Berkas Perkara
13	Terwujudnya manajemen Organisasi Profesional, produktif, dan proposional serta berkinerja tinggi	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	82 Indeks
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 Kabupaten/Kota
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	92 Indeks	
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/Kota	
14			Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal
15				

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2023 mempunyai 15 (tiga belas) sasaran kegiatan dimana sasaran kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran strategis program pada masing-masing kedeputian BNN RI dengan 21 (sembilan belas) indikator kegiatan kinerja yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (RPJM) dan jumlah target yang diperjanjikan dimana Penetapan Kinerja tersebut diturunkan (*cascading*) ke 9 (sembilan) BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sehingga capaian *outcome* merupakan kompilasi dari BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 atas pencapaian sasaran maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang telah ditetapkan beserta BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Pada tahun 2023 indikator yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah 15 (tiga belas) sasaran strategis dan 21 (sembilan belas) indikator kinerja, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA BNN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/ Kota	8 Kabupaten/ Kota	100%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	180%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"			
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,25 Indeks	3,25 Indeks	100%
5	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63%	71,67%	113,76%
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitas	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100 Orang	112 Orang	112%
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	8 Orang	15 Orang	187,5%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	20 Unit	20 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,34 Indeks	3,67 Indeks	109,88%
9	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
10	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas Perkara	21 Berkas Perkara	105%
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%
12	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2 Berkas Perkara	0 Berkas Perkara	0%
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	82 Indeks	77,87 Indeks	94,96%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten/ Kota	11,11%
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	92 Indeks	95,32 Indeks	103,61%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100%
15	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	85 Indeks	85 Indeks	100,02%

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran BNN Kabupaten/Kota selama tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian periode selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian diuraikan analisa capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja sesuai bidang tugas P4GN sebagai berikut:

1	Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan target capaian 8 (delapan) Kabupaten/Kota.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	8 Kabupaten/ Kota	8 Kabupaten/ Kota	100%

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PIE)

Definisi Operasional

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PIE) bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di tahun 2023 ini, BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 8 BNN Kab/Kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi (51).

Hasil

Indeks Ketahanan Diri Remaja diukur dengan menggunakan skala indeks ketahanan diri. BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki satu program prioritas nasional yaitu Pelatihan Softskill di SMP sederajat, sedangkan di BNNK memiliki program Dialog Interaktif Remaja. Indeks ketahanan diri sendiri dapat diukur dengan melakukan

kegiatan Soft Skill SMP dan Informasi Edukasi pada Remaja dalam bentuk talkshow (untuk di BNNP dan atau BNNK), serta melalui kegiatan dialog interaktif remaja (di BNN Kabupaten/Kota). Sedangkan di BNNP sendiri, indeks ketahanan diri dilakukan dengan mengambil sampel dari kegiatan informasi dan edukasi P4GN melalui tatap muka, baik secara langsung maupun virtual. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 8 Kab/Kota dengan kategori tinggi dengan realisasi 5 kab/kota kategori sangat tinggi dan 3 Kab/kota dengan kategori tinggi dan 1 kab/kota dengan kategori rendah yaitu di BNNK Batang. Rata-rata Dektari Prov Jateng berkategori Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

CAPAIAN DEKTARI BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2022-2023

SATUAN KERJA	DEKTARI PER DESEMBER 2022	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2022	DEKTARI PER DESEMBER 2023	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2023
BNN Provinsi Jawa Tengah	55,38	Sangat Tinggi	51.75	Tinggi
BNN Kabupaten Temanggung	54,85	Sangat Tinggi	52.67	Tinggi
BNN Kota Tegal	56,18	Sangat Tinggi	56,58	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Banyumas	56,42	Sangat Tinggi	55.75	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Cilacap	55,71	Sangat Tinggi	54.98	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Kendal	56,46	Sangat Tinggi	55.78	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Batang	52,68	Tinggi	48.43	Rendah
BNN Kabupaten Purbalingga	58,23	Sangat Tinggi	55.67	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Magelang	53,19	Tinggi	52.69	Tinggi
BNN Kota Surakarta	52,35	Tinggi	50.13	Tinggi
DEKTARI PROVINSI JATENG	55,14	Sangat Tinggi	53.44	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas terdapat penurunan capaian nilai Dektari BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dari Tahun 2022 semula 55,14 dengan kategori Sangat Tinggi, pada Tahun 2023 menjadi 53,44 dengan kategori Tinggi, hal tersebut dikarenakan terdapatnya *automatic adjustment* anggaran informasi dan edukasi di BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran sehingga mengurangi jumlah kegiatan penyebarluasan

informasi dan edukasi yang notabene merupakan salah satu penunjang penilaian indeks ketahanan diri anak dan remaja (dektari).

Kendala

Indeks Ketahanan Diri Remaja dapat diukur setelah peserta memperoleh informasi dan edukasi P4GN, sehingga harus terlaksana terlebih dahulu kegiatan baru dapat diukur. Pengukuran sendiri dilakukan dengan menginput kuesioner ketahanan diri remaja yang sudah ditentukan oleh BNN RI, dan sampai dengan bulan desember belum keluar hasil perhitungan DEKTARI dari BNN RI.

Strategi

Berkoordinasi dengan BNNK agar segera menyelesaikan penginputan Dektari dan berkoordinasi dengan BNN RI terkait hasil angka dektari.

2	Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya diimplementasikan pada indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
2	Jumlah kabupaten/ kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	5 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	180%

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (Advokasi)

Definisi Operasional

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di tahun 2023 ini, BNN Provinsi Jawa Tengah memperoleh target 5 BNN Kab/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi. Untuk di BNN Provinsi sendiri, rangkaian kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga terdiri dari Rapat Koordinasi, Pelaksanaan intervensi Program Ketahanan Keluarga. Di BNN Kabupaten/Kota juga memiliki angka yang sama. Angka ketahanan diri keluarga ini dapat terukur ketika rangkaian kegiatan dari rapat hingga fasilitasi selesai dilaksanakan.

Hasil

Hasil indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi, yang diperoleh dari data perhitungan BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil laporan BNNK dan pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Jawa Tengah, keseluruhan BNNK telah menyelesaikan rangkaian kegiatan ketahanan keluarga, mulai dari rapat koordinasi hingga fasilitasi ketahanan keluarga tahap 1-4. Sedangkan di BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri, pelaksanaan ketahanan keluarga menysasar Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Kembangarum, yang merupakan salah satu Kelurahan Bersinar di Provinsi Jawa Tengah. Untuk di Provinsi Jawa Tengah sendiri, keseluruhan rangkaian kegiatan Ketahanan Keluarga telah selesai dilaksanakan. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 Kab/Kota yang kesemuanya sudah mencapai target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
CAPAIAN IKK BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2021-2022

SATKER	NILAI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) Tahun 2022	KATEGORI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) Tahun 2022	NILAI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) Tahun 2023	KATEGORI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) Tahun 2023
BNN Provinsi Jawa Tengah	75,268	Rendah	86.07	Tinggi
BNN Kab Temanggung	90,714	Sangat Tinggi	87.23	Tinggi
BNN Kota Tegal	86,071	Tinggi	84.64	Tinggi
BNN Kab Banyumas	85,089	Tinggi	86.78	Tinggi
BNN Kab Cilacap	88,839	Sangat Tinggi	85.44	Tinggi
BNN Kab Kendal	89,464	Sangat Tinggi	90.00	Sangat Tinggi
BNN Kab Batang	84,018	Tinggi	94.46	Sangat Tinggi
BNN Kab Purbalingga	89,375	Sangat Tinggi	86.16	Tinggi
BNN Kab Magelang	90,536	Sangat Tinggi	85.44	Tinggi
BNN Kota Surakarta	85,982	Tinggi	91.69	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat diketahui di BNN Provinsi tahun 2023 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja yaitu: Target indeks ketahanan keluarga (DEKTARA) terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi memiliki target 5 Kabupaten/kota dengan realisasi 9 Kabupaten/Kota. Sama dengan capaian tahun 2022 dengan realisasi 9 Kabupaten/ Kota yang target indeks ketahanan keluarga (DEKTARA) terhadap penyalahgunaan narkoba-nya mencapai kategori tinggi. Dapat diartikan bahwa meningkatnya daya tangkal keluarga di wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena adanya intervensi/ pembinaan keluarga dari BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah.

Kendala

Data baru dapat diperoleh pada akhir kegiatan sekitar bulan Oktober 2023, karena merupakan satu rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dan baru dapat dihitung jika kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Link untuk input sendiri baru dibagikan sekitar bulan September akhir. Hasil angka ketahanan diri juga tidak bisa diketahui oleh BNNP karena proses pengolahan data kuesioner dikelola oleh BNN RI.

Strategi

Mendorong BNN Kabupaten/Kota untuk segera menginput kuesioner ketahanan keluarga serta berkoordinasi dengan BNN RI terkait input dan hasil kuesioner ketahanan keluarga.

3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
3	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi Jawa Tengah	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100%

Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga Yang Berpartisipasi Aktif Dalam Mewujudkan

IKOTAN (Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba)

Definisi Operasional

Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat pada tahun 2023 sudah dapat terlaksana 100% berupa rapat pemetaan kelompok sasaran, rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba dan bimbingan teknis P4GN di kelompok sasaran instansi pemerintah dan masyarakat serta proses monitoring dan evaluasi kota/kab tanggap ancaman narkoba. Kegiatan IKOTAN memiliki beberapa variabel yaitu :

1. Ketahanan Keluarga
2. Ketahanan Masyarakat
3. Kewilayahan
4. Kelembagaan
5. Hukum

Dan di BNN Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 memiliki target 9 kab/kota dengan kategori tanggap ancaman narkoba

Hasil

Hasil indeks kota tanggap ancaman narkoba (IKOTAN) berkategori tanggap, yang diperoleh dari data perhitungan BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil laporan BNNK dan pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Jawa Tengah, keseluruhan BNNK telah menyelesaikan rangkaian kegiatan ketahanan keluarga, mulai dari rapat koordinasi hingga pelaksanaan bimbingan teknis P4GN yang memiliki 5 variabel yaitu ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum dengan indeks skala 1-4. Sedangkan di BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri, pelaksanaan bimbingan teknis P4GN dilaksanakan di instansi pemerintah baik dari instansi provinsi maupun kab/kota, dan juga sudah dilaksanakan rapat sinkronisasi IKOTAN yang dilaksanakan di Kab Banyumas. Keseluruhan rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 9 Kab/Kota dengan hasil sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI INDEKS KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (IKOTAN)	KATEGORI INDEKS KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (IKOTAN)
1	BNNP Jawa Tengah	3.32	Tanggap
2	BNN Kab Temanggung	3.30	Tanggap
3	BNN Kota Tegal	3.26	Tanggap
4	BNN Kab Banyumas	3.32	Tanggap
5	BNN Kab Cilacap	3.38	Tanggap
6	BNN Kab Kendal	3.30	Tanggap
7	BNN Kab Batang	3.48	Tanggap
8	BNN Kab Purbalingga	3.17	Tanggap
9	BNN Kab Magelang	3.58	Sangat tanggap
10	BNN Kota Surakarta	3.17	Tanggap

Kendala

Banyaknya kegiatan non dipa permintaan/fasilitasi baik dari instansi pemerintah, institusi swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat

Strategi

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada bulan November dan terus melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan Peran Serta Masyarakat baik di lingkungan pendidikan, institusi swasta, instansi pemerintah, dan lingkungan masyarakat.

4	Sasaran Strategis	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Beralih Status dari “Bahaya” menjadi ‘Waspada’ dengan target 2 Kawasan serta Nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi dengan target 3,40.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
4	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Beralih Status dari “Bahaya” menjadi ‘Waspada’	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	3,25	3,25	100%

Fasilitas Dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Yang Beralih Status Dari Bahaya Menjadi Waspada Dan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi.

Definisi Operasional

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan di daerah perkotaan pada tahun 2023 sudah dapat tercapai seluruhnya yaitu 100% dari realisasi, kegiatan yang sudah dilaksanakan pemetaan kawasan rawan narkoba, terlaksananya rapat kerja dalam rangka sinergi program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder, serta bimbingan teknis lifeskill di kelurahan Purwosari, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat kelurahan purwosari dengan status bahaya penyalahgunaan narkoba dapat beralih fungsi dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut.

Hasil

Melalui bimtek dengan life skill pelatihan teknik dasar barbershop (Potong Rambut) bekerjasama dengan Jons Barber Semarang yang dilaksanakan di Kel Purwosari yang sebelum diadakan bimtek lifeskill berkatergori bahaya, setelah dilakukan bimbingan teknis lifeskill berubah menjadi siaga yaitu dengan nilai IKKR (Indeks Keterpulihan kawasan Rawan) sebesar 3.25 (siaga).

Kendala

Sulitnya mempengaruhi warga untuk melaksanakan pola hidup sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Strategi

Diupayakan pendekatan melalui aparat kelurahan, babinsa, babinkamtibmas dan tokoh masyarakat toga setempat.

5	Sasaran Strategis	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
5	Presentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63%	83,30%	132,22%

Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkoba Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Definisi Operasional

Presentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu hasil perhitungan yang diperoleh dari pengukuran kualitas hidup klien antara sebelum menerima layanan rehabilitasi dengan setelah menerima layanan rehabilitasi sampai selesai program pascarehabilitasi yang dihitung menggunakan pengukuran WHO-QOL yang terdiri dari beberapa domain Fisik, Psikologis, Sosial, Lingkungan.

Cara Pengukuran

Adapun pengukuran indikator "Presentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup" yaitu menghitung prosentase kenaikan

angka kualitas hidup klien dengan membandingkan antara kondisi klien sebelum dan sesudah menerima layanan rehabilitasi dengan menggunakan instrument WHOQoL.

Hasil

Presentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup di masing–masing wilayah memiliki target. Berikut rincian target dan realisasi di masing–masing wilayah:

Tabel 5
PRESENTASE PENYALAHGUNA DAN/ATAU PECANDU NARKOTIKA
YANG MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2023

SATUAN KERJA	2023	
	TARGET	CAPAIAN
BNNP Jawa Tengah	63	71,67
BNNK Cilacap	70	99,19
BNNK Kendal	75	89,29
BNNK Batang	63	83,62
BNNK Purbalingga	63	77,50
BNNK Temanggung	75	90,00
BNNK Tegal	75	95,00
BNNK Banyumas	75	90,74
BNNK Surakarta	70	83,33
BNNK Magelang	63	73,40

Kendala

1. BNNK Cilacap

Situasi dalam proses melakukan pengukuran kualitas hidup harus benar-benar kondusif sehingga tidak terganggu oleh aktifitas-aktifitas lain disekitar yang dapat merusak konsentrasi klien dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh petugas.

2. BNNK Kendal

- a. Kurangnya jejaring sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan klien;
- b. Klien pindah rumah atau bekerja di luar kota tanpa konfirmasi kepada petugas;
- c. Pemantauan klien yang terhambat karena komunikasi yang tidak efektif dengan klien.

3. BNNK Batang, BNNK Tegal dan BNNK Magelang

Terdapat beberapa klien yang drop out

4. BNNK Banyumas

- a. Rentang waktu pengukuran WHOQoL-BREF pada klien rehabilitasi rawat jalan di Klinik antara awal dan akhir layanan yaitu sekitar 8 minggu hingga 12 minggu;
 - b. Kemampuan klien dalam memahami pertanyaan pada instrumen WHOQoL-BREF;
 - c. Kondisi suasana hati klien dalam mengisi instrumen WHOQoL-BREF, dengan mempertimbangkan tidak hanya satu instrumen layanan rehabilitasi yang harus diisi oleh klien
5. BNNK Surakarta
- a. Klien tidak konsisten dalam kedatangan untuk mengikuti layanan rehabilitasi; Ada kegiatan-kegiatan diluar kegiatan rehabilitasi yang mengganggu jadwal klien untuk rehabilitasi.

Strategi

1. BNNK Cilacap

Pastikan sebelum melakukan proses wawancara diberikan beberapa aturan dasar seperti lamanya proses wawancara, dipersilahkan untuk minum dan buang air kecil terlebih dahulu serta menciptakan kondisi yang nyaman dan kondusif terhadap lingkungan sekitar dalam proses wawancara.

2. BNNK Kendal

- a. Melakukan PKS dengan beberapa lembaga/ instansi lain seperti
 - i. Balai Besar Pelatihan Vokasional Produktivitas (BBPVP) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengembangan diri klien dalam rangka bina lanjut program pasca rehabilitasi (Pelatihan perawatan sepeda motor injeksi)
 - ii. PKS dengan Balai Sentra Terpadu Kartini Kementerian Sosial terkait pembinaan kewirausahaan bagi klien pasca rehabilitasi
- b. Mencari informasi terkait klien melalui keluarga atau orang terdekat
- c. Menerapkan komunikasi efektif kepada klien

3. BNNK Batang, BNNK Tegal, dan BNNK Magelang

- a. Melakukan penjangkauan
- b. Membina komunikasi yang baik dengan klien pada saat pendampingan dan pemantauan
- c. Melibatkan keluarga klien dalam mendukung pemulihannya

4. BNNK Banyumas

- a. Pengisian instrumen WHOQoL-BREF dilakukan secara mandiri oleh klien dengan kemampuan yang cukup, jika tidak maka petugas melakukan

pendampingan atau wawancara terhadap klien saat pengisian instrumen WHOQoL-BREF;

- b. Petugas membina komunikasi yang baik dengan klien dan atau keluarga klien;
- c. Petugas memastikan klien memahami instruksi pengisian dan tujuan dari pengisian setiap instrumen yang ada pada layanan rehabilitasi ataupun intervensi berbasis masyarakat.

5. BNNK Surakarta

- a. Membuat kesepakatan diluar jadwal;
- b. Menghubungi keluarga/mengingatkan klien tentang jadwal rehabilitasi.

6	Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
6	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100 Orang	112 Orang	112%
	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	8 Orang	15 Orang	187,5%

Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih

Definisi Operasional

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai petugas Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang telah terlatih dan bisa melakukan layanan rehabilitasi kepada masyarakat di Unit Intervensi Berbasis Masyarakat.

Adapun pengukuran indikator “Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” diukur dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM.

Hasil

Target 2023 jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 100 orang yang tersebar di wilayah kerja BNNP dan BNNK. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 112 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
CAPAIAN PETUGAS IBM TERLATIH
BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2022-2023

SATUAN KERJA	2022		2023	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
BNNP Jawa Tengah	15	15	10	12
BNNK Cilacap	5	10	10	20
BNNK Kendal	5	5	10	10
BNNK Batang	5	5	10	10
BNNK Purbalingga	5	5	10	10
BNNK Temanggung	5	5	10	10
BNNK Tegal	5	5	10	10
BNNK Banyumas	5	5	10	10
BNNK Surakarta	5	5	10	10
BNNK Magelang	5	5	10	10
TOTAL	60	65	100	112

Pelaksanaan IBM telah selesai. Seluruh agen pemulihan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan materi yang telah didapatkan saat bimbingan teknis petugas IBM. Jumlah agen pemulihan yang mendapat pelatihan sebanyak 112 orang.

Kendala

1. BNNP Jawa Tengah

Agen pemulihan di kelurahan Kembangarum berganti–ganti, sehingga ada beberapa agen pemulihan yang menjalankan layanan IBM tanpa mengikuti pelatihan teknis (bimbingan teknis petugas IBM).

2. BNNK Cilacap

Situasi dalam proses melakukan pengukuran kualitas hidup harus benar-benar kondusif sehingga tidak terganggu oleh aktifitas-aktifitas lain disekitar yang dapat merusak konsentrasi klien dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh petugas.

3. BNNK Kendal

Sulitnya menentukan waktu dalam penyelenggaraan bimtek dikarenakan calon agen pemulihan juga bekeja full time

4. BNNK Batang

Kesibukan masing-masing agen pemulihan membuat beberapa AP beberapa berhalangan hadir saat layanan IBM. Serta adanya masalah internal pada AP sehingga terjadi perubahan pada koordinator AP pada salah satu IBM yakni IBM Kelurahan Sambong .

5. BNNK Purbalingga

Prinsip utama kendala operasionalisasi IBM diakibatkan karena faktor Agen Pemulihan memiliki beragam aktivitas / kesibukan sesuai tugas, peran dan fungsinya pada wilayah masing-masing

6. BNNK Tegal dan BNNK Magelang

Karena kesibukan masing-masing agen pemulihan sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan jadwal bimtek.

7. BNNK Surakarta

Belum dapat menyamakan jadwal antara Petugas IBM dengan BNNK, terkendala dengan bulan Ramadhan.

Strategi

1. BNNP Jawa Tengah

Agen pemulihan yang sudah terlatih memberikan informasi kea gen pemulihan yang baru didampingi oleh petugas rehabilitasi BNNP.

2. BNNK Cilacap

Pastikan sebelum melakukan proses wawancara diberikan beberapa aturan dasar seperti lamanya proses wawancara, dipersilahkan untuk minum dan buang air kecil terlebih dahulu serta menciptakan kondisi yang nyaman dan kondusif terhadap lingkungan sekitar dalam proses wawancara.

3. BNNK Kendal

Membuat kesepakatan waktu pelaksanaan bimtek dengan calon agen pemulihan

4. BNNK Batang

Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait melalui rapat rutin IBM.

5. BNNK Purbalingga

Teknis operasionalisasi layanan IBM merupakan hasil kesepakatan bersama antara tim BNNK Purbalingga, Agen Pemulihan dan Klien

6. BNNK Tegal dan BNNK Magelang

Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait melalui rapat pembentukan IBM yang telah dilaksanakan sebelumnya

7. BNNK Surakarta

Koordinasikan dengan Petugas IBM terkait jadwal kegiatan.

Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis

Definisi Operasional:

Petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas rehabilitasi yang bertugas sebagai konselor adiksi yang dianggap kompeten sebagai konselor adiksi setelah mengikuti uji sertifikasi kompetensi.

Adapun pengukuran indikator “Petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis” dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas/ konselor adiksi pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah dianggap kompeten setelah mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan pada tahun berjalan.

Hasil

Target 2023 jumlah Petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebanyak 8 orang yang berasal dari BNNP, BNNK, lembaga mitra milik BNNP dan BNNK. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 15 orang.

Kendala

Minimnya petugas rehabilitasi yang tertarik untuk mengikuti uji sertifikasi konselor adiksi.

Strategi

Menginformasikan ke BNNK, Lembaga mitra BNNP dan BNNK terkait mekanisme pelaksanaan uji sertifikasi yang diawali dengan bimbingan teknis terkait pelaksanaan uji sertifikasi.

7	Sasaran strategis	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
7	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah	20 Unit	20 Unit	100%

Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di

Wilayah Provinsi

Definisi Operasional

Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah lembaga rehabilitasi yang melakukan layanan rehabilitasi kepada penyalah guna dan atau pecandu narkoba sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh BNN dan atau tandard pelayanan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 8807:2019. Adapun pengukuran indikator “Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)” dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Hasil

Target 2023 jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 3 lembaga. Dari 3 lembaga yang diajukan dalam penilaian SPM/ SNI regular tahun 2023 terdapat 3 lembaga yang telah memenuhi syarat. Berikut hasil dari penilaian SPM/ SNI regular:

Tabel 7
LEMBAGA REHABILITASI MEMENUHI SYARAT SPM

NO	NAMA LEMBAGA	SETTINGAN LAYANAN
1	Puskesmas Karanganyar Kebumen	Rawat Jalan
2	Klinik Pratama Bina Sehat BNNK Batang	Rawat Jalan
3	Klinik Pratama BNNK Temanggung	Rawat Jalan

Kendala

1. BNNK Temanggung perlu revisi di aspek SOP
2. BNNK Batang masih menggunakan formulir layanan yang lama, pencatatan dalam rekam rehabilitasi belum memenuhi kaidah
3. Puskesmas Karanganyar pencatatan dalam rekam rehabilitasi belum memenuhi kaidah
4. Belum adanya PKS dengan mitra terkait layanan di BNNK Batang dan BNNK Temanggung.

Strategi

Memindahkan form SPM ke dalam form SNI Melakukan pendampingan secara berkala terkait pemenuhan aspek – aspek yang tertuang dalam instrument SNI kepada 3 lembaga tersebut.

Lembaga Rehabilitasi Mitra BNNK Yang Operasional

Target lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal adalah target BNNP Jawa Tengah, sedangkan BNNK memiliki target lembaga rehabilitasi yang operasional. Berikut lembaga rehabilitasi mitra BNNK yang operasional:

Tabel 8
LEMBAGA REHABILITASI MITRA BNNK OPERASIONAL

NO	WILAYAH	TARGET	CAPAIAN	LEMBAGA	JUMLAH KLIEN 2022	JUMLAH KLIEN 2023
1	BNNK Batang	1	2	RS H. A. Zaky Djunaid	45	19
				Klinik Pratama BNNK Batang	0	26
2	BNNK Magelang	1	3	RS Aisyiyah Muntilan	3	1
				Panti Rehabilitasi Betesda	2	13
				Klinik Pratama BNNK Magelang	0	45
3	BNNK Cilacap	1	4	Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Dan Narkoba Tambihul Ghofilin	23	15
				Klinik Karlina	1	2
				Klinik PKU Muhammadiyah Sampang	3	2
				Klinik Pratama BNNK Cilacap	0	24
4	BNNK Purbalingga	1	2	Yayasan Annur H. Supono	36	41
				Klinik BNNK Purbaligga	0	23
5	BNNK Temanggung	1	1	Klinik Pratama BNNK Temanggung	0	28
6	BNNK Tegal	1	1	Klinik BNNK Tegal	0	15
7	BNNK Banyumas	1	3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	41	44
				RSUD Banyumas	25	50
				Sentra Satria Baturraden	36	57
8	BNNK Surakarta	1	6	RSJD Arif Zainuddin	114	51
				RSUD dr. Moewardi	16	16
				Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa	142	77
				Yayasan Anargya Sober House	16	55
				Klinik Imron Medika	0	1
				Klinik Pratama BNNK Surakarta		
9	BNNK Kendal	1	1	Klinik Pratama BNNK Kendal	0	13

Kendala

1. BNNK Cilacap

Terdapat kendala terkait masalah intern di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Tambihul Ghofilin dibawa naungan Yayasan Assalam yang berkerjasama dengan BNN, menyampaikan perubahan Yayasan saat ini sedang dalam proses pendirian Yayasan, tidak lagi di bawah Yayasan Assalam, secara fasilitas memadai namun untuk Sumber Daya Manusia masih sangat terbatas. Klinik Karlina juga mengalami kendala terkait ijin operasional yang tak kunjung selesai di perpanjang dan adanya masalah di manajemen klinik sehingga tidak bisa untuk maksimal.

2. BNNK Kendal

BNNK Kendal tidak memiliki lembaga rehabilitasi mitra, sehingga dalam pemenuhan target berasal dari Klinik milik BNNK Kendal. Dengan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Klien tidak konsisten dalam kedatangan untuk program rehab;
- b. ada kegiatan-kegiatan diluar kegiatan rehab yang mengganggu jadwal klien untuk rehab;
- c. Stigma Negatif Penyalahguna narkoba sehingga malu atau takut dalam mengakses layanan rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi di instansi pemerintah tidak berjalan secara optimal.

3. BNNK Batang

- a. Layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat belum berjalan optimal karena terkendala kurangnya SDM yang terlatih (SDM yang sudah terlatih resign)
- b. BNNK Batang belum memiliki mitra dari lembaga rehabilitasi instansi pemerintah

4. BNNK Banyumas

BNNK Banyumas memiliki 4 lembaga rehabilitasi mitra, namun hanya 3 yang operasional (RSUD Siaga Medika Banyumas tidak operasional). Beberapa kendala yang ada yaitu:

- a. Layanan rehabilitasi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Banyumas masih menginduk pada layanan di Poli Jiwa (Tata Kelola, SDM, Sarana Prasarana);
- b. Sentra Satria Napza di Baturraden telah menjadi multi layanan sehingga kapasitas layanan rehabilitasi berkurang;
- c. Sebagian fasilitas rehabilitasi menggunakan instrumen skrining, asesmen dan terapi yang tidak sama dengan standar BNN sehingga mengalami hambatan saat SDM mengikuti uji kompetensi petugas rehabilitasi;

- d. Sebagian klien dalam menjalani terapi dengan tujuan mendapatkan obat dan tidak mengikuti prosedur dari lembaga rehabilitasi;
 - e. Masih adanya fasilitas layanan kesehatan yang bukan mitra BNN (karena adanya perbedaan dalam penanganan) hanya melayani rehabilitasi narkoba jika ada pengantar dari BNN, hal ini menimbulkan kesan buruk terkait BNN pada masyarakat
5. BNNK Purbalingga
- a. Perubahan kebijakan SDM dalam tubuh Kementerian Sosial membawa dampak pada petugas layanan rehabilitasi di Yayasan “AN NUR” Bungkel tidak lagi fokus sebagai Konselor atau Peksos Rehabilitasi tetapi juga menangani permasalahan sosial lainnya sehingga berdampak pada layanan rehabilitasi
 - b. Petugas rehabilitasi pada Yayasan “AN NUR” yang telah tersertifikasi masih terbatas.
6. BNNK Temanggung
- BNNK Temanggung memiliki 1 lembaga rehabilitasi mitra yaitu RSUD Temanggung, namun lembaga tersebut tidak operasional, sehingga pemenuhan target berasal dari Klinik milik BNNK Temanggung
7. BNNK Tegal
- BNNK Tegal memiliki 2 lembaga rehabilitasi mitra yaitu Klinik Aisiyah Siti Hajar dan Yayasan Al Ma’laa Getasrejo cabang Tegal, namun kedua lembaga rehabilitasi tersebut tidak beroperasi, sehingga dalam pemenuhan target berasal dari Klinik milik BNNK Tegal. Berikut kendala lain :
- a. Layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat belum berjalan optimal karena terkendala kurangnya SDM yang terlatih
 - b. BNN Kota Tegal belum memiliki mitra dari lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.
8. BNNK Surakarta
- a. Klien tidak konsisten dalam kedatangan untuk program rehabilitasi;
 - b. Kurangnya klien yang mengakses layanan;
 - c. Stigma negatif penyalahguna narkoba sehingga malu atau takut dalam mengakses layanan rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi tidak berjalan secara optimal
9. BNNK Magelang
- a. Layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat belum berjalan optimal karena terkendala kurangnya SDM yang terlatih
 - b. BNNK Magelang belum memiliki mitra dari lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Strategi

1. BNNK Cilacap

Berkoordinasi dengan Pembina Fungsi terkait dengan masalah intern klinik Karlina apakah perlu dipertimbangkan untuk kelanjutan kerjasama di tahun depan dengan kondisi saat ini dan Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa dan Narkoba Tambihul Ghofilin untuk menambah SDM sehingga dapat memaksimalkan layanan yang diberikan kepada klien

2. BNNK Kendal

- a. Membuat kesepakatan diluar jadwal;
- b. Menghubungi keluarga/mengingatkan klien tetang jadwal rehab;
- c. Aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

3. BNNK Batang

Memberikan bimbingan teknis kepada lembaga mitra BNNK Batang

4. BNNK Banyumas

- a. Merekomendasikan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait peningkatan kemampuan kepada petugas rehabilitasi;
- b. Melakukan orientasi program layanan dengan lebih detail dan memastikan kesanggupan klien dalam mengikuti prosedur lembaga;
- c. Memberikan sosialisasi terkait lembaga-lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNN Kabupaten Banyumas;
- d. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi.

5. BNNK Purbalingga

- a. Mendorong dan menyarankan agar Yayasan “AN NUR” menjalin kerjasama dengan stakeholders terkait dukungan layanan rehabilitasi seperti Puskesmas, Balai Latihan Kerja dan lain sebagainya
- b. Mengajukan tambahan pelatihan UTC 5 kepada Pembina Fungsi (BNNP Jateng) bagi petugas LRKM Mitra BNNK

6. BNNK Temanggung

BNNK Temanggung akan mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga atau dinas terkait kegiatan layanan rehabilitasi

7. BNNK Tegal

- a. Memberikan bimbingan teknis kepada lembaga mitra BNN Kota Tegal
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal terkait dengan lembaga instansi pemerintah yang berpotensi untuk memberikan layanan rehabilitasi

8. BNNK Surakarta

- a. Merekomendasikan peningkatan kemampuan kepada petugas rehabilitasi;
- b. Melakukan koordinasi secara intensif terhadap Lembaga rehabilitasi.
- c. Aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

9. BNNK Magelang

- a. Memberikan bimbingan teknis kepada lembaga mitra BNNK Magelang
Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang terkait dengan lembaga instansi pemerintah yang berpotensi untuk memberikan layanan rehabilitasi

Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Di Wilayah

Definisi

Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang dibentuk sebagai bagian dari Program Desa Bersinar. Unit IBM yang dibentuk dan minimal telah melakukan kegiatan sosialisasi, pemetaan wilayah, penjangkauan dan skrining (fase 2) kepada korban penyalahgunaan narkoba di wilayah kerja masing-masing unit IBM.

Adapun pengukuran indikator “Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)” dilakukan dengan cara melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada unit IBM yang telah dibentuk menggunakan instrument yang sudah ditetapkan.

Hasil

Target 2023 jumlah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebanyak 20 unit terdiri dari 2 unit di Kota Semarang, 2 unit di Kabupaten Kendal, 2 unit di Kabupaten Batang, 2 unit di Kota Tegal, 2 unit di Kabupaten Temanggung, 2 unit di Kabupaten Purbalingga, 2 unit di Kabupaten Banyumas, 2 unit di Kabupaten Cilacap, 2 unit di Kabupaten Magelang, 2 unit di Kota Surakarta. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 20 unit.

Kendala

1. BNNP Jawa Tengah
 - a. IBM Purwosari

IBM Purwosari sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 8 klien. IBM Purwosari mendapatkan bantuan dari warga dan pemerintah daerah setempat sebesar 3.000.000 untuk operasional layanan. Selain itu IBM Purwosari bekerjasama dengan PKBM untuk klien menyelesaikan pendidikannya. Kendala dalam pelaksanaan IBM di kelurahan Purwosari yaitu klien memiliki tingkat pemahaman yang rendah. IBM Purwosari mencapai fase prima.

b. IBM Bangsikonar Kelurahan Kembangarum

IBM Bangsikonar sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 8 klien. IBM mendapatkan bantuan dari warga berupa konsumsi kegiatan sosialisasi dan olahraga bersama antara klien dengan warga yang berasal dari anggaran kas RW/RT. Kendala dalam pelaksanaan IBM yaitu kurangnya komitmen agen pemulihan dalam menjalankan program IBM dan agen pemulihan memiliki aktifitas yang sangat padat, sehingga program IBM di kelurahan Kembangarum tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disusun. IBM Bangsikonar mencapai tahap tangguh.

2. BNNK Cilacap

IBM yang terbentuk di BNNK Cilacap ada 2 IBM (IBM Kelurahan Gumilir dan IBM Kelurahan Mertasinga). IBM tersebut sudah menjalankan layanan intervensi kepada 10 klien (masing – masing IBM 5 klien). Kendala dalam pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Cilacap :

- a. Kesibukan AP diluar kegiatan IBM
- b. Kegiatan IBM bersamaan dengan kegiatan di tahun politik sehingga beberapa kegiatan menjadi terhambat dan terjadi perubahan jadwal.

Kedua IBM mencapai fase berkembang.

3. BNNK Kendal

IBM yang terbentuk di BNNK Tegal ada 2 IBM yaitu IBM Mahoni Desa Penyangkringan dan IBM Desa Tosari. IBM tersebut sudah menjalankan layanan intervensi kepada 8 klien (masing – masing IBM 4 klien). Kendala pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Kendal :

- a. Sulitnya mengatur jadwal klien dan jadwal AP dalam pelaksanaan layanan IBM;
- b. Tokoh masyarakat masih enggan menginformasikan karena permasalahan narkoba masih dianggap tabu;
- c. Calon klien merasa takut untuk mengikuti program, masih membutuhkan pendekatan secara personal;
- d. Calon klien merasa tidak membutuhkan layanan IBM

Kedua IBM tersebut mencapai fase tangguh.

4. BNNK Banyumas

IBM yang terbentuk di BNNK Banyumas ada 2 IBM yaitu IBM Tangguh Desa Singasari dan IBM Wijaya Kusuma Desa Sokaraja.). IBM tersebut sudah menjalankan layanan intervensi kepada 10 klien (masing – masing IBM 5 klien). Kendala dalam pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Banyumas :

- a. Kesibukan Agen Pemulihan;
- b. Klien yang terdiri dari pekerja dan pelajar sehingga layanan dilaksanakan pada malam hari atau pada hari libur;
- c. Stigma masyarakat terhadap AP (sebagai mata-mata BNN) dan terhadap klien (sebagai orang yang bermasalah).

Kedua IBM tersebut telah mencapai fase prima

5. BNNK Purbalingga

IBM yang terbentuk di BNNK Purbalingga ada 2 IBM yang bernama IBM Nawasena dan IBM Dasataka.). IBM tersebut sudah menjalankan layanan intervensi kepada 10 klien (masing – masing IBM 5 klien). Kendala dalam pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Purbalingga :

- a. IBM Nawasena : masih adanya salah persepsi dari Kepala Desa yang menganggap seluruh kegiatan terkait Desa Bersinar di-cover (ditanggung) oleh IBM sehingga mengendorkan semangat Agen Pemulihan
- b. IBM Dasataka : jumlah calon klien jauh melampaui target (terpetakan 69 orang penyalah guna yang artinya masih adan 64 calon klien yang harus ditangani oleh IBM di tahun 2024 dan seterusnya)

Kedua IBM mencapai fase tangguh

6. BNNK Tegal

IBM yang terbentuk di BNNK Tegal ada 2 yaitu IBM Pekauman dan IBM Katuren. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 8 klien (masing – masing IBM 4 klien). Kendala dalam pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Tegal yaitu Kesibukan masing-masing Agen Pemulihan karena memiliki pekerjaan masing-masing. Kedua IBM tersebut mencapai fase berkembang

7. BNNK Surakarta

IBM yang terbentuk di BNNK Surakarta ada 2 yaitu IBM Sudiroprajan dan IBM Setabelan. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 10 klien (masing – masing IBM 5 klien). Kendala dalam pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Surakarta yaitu Kesibukan masing-masing Agen Pemulihan dan klien, sehingga sulit

menyamakan jadwal layanan. IBM Kelurahan Supiroprajan dan Joyotakan mencapai fase prima dan IBM Kelurahan Setabelan mencapai fase Tangguh

8. BNNK Magelang

IBM yang terbentuk di BNNK Magelang ada 2 yaitu IBM Desa Borobudur dan IBM Desa Ngadirojo. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 10 klien (masing – masing IBM 5 klien). Kendala dalam pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Magelang yaitu Kesibukan masing-masing Agen Pemulihan karena memiliki pekerjaan masing-masing. IBM Desa Borobudur mencapai fase prima dan IBM Desa Ngadirojo mencapai fase tangguh

9. BNNK Temanggung

IBM yang terbentuk di BNNK Temanggung ada 2 yaitu IBM “Ngrekso Jiwo” Candioto dan IBM “SADAR” Desa Wanutengah. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 4 klien (masing – masing IBM 2 klien). Kendala dalam pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Temanggung yaitu agen pemulihan memiliki variasi kesibukan dan pekerjaan, sehingga BNNK Temanggung bersama IBM melakukan kegiatan dan layanan dengan agen pemulihan yang memiliki waktu luang. IBM Desa Candioto mencapai fase prima, dan Desa Wanutengah mencapai fase tangguh

10. BNNK Batang

IBM yang terbentuk di BNNK Batang ada 2 yaitu IBM Proyonanggan Tengah dan IBM Kelurahan Sambong. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 10 klien (masing – masing IBM 5 klien). Kendala dalam pelaksanaan IBM di wilayah BNNK Batang yaitu Kesibukan masing-masing Agen Pemulihan karena memiliki pekerjaan masing-masing. IBM kelurahan Sambong mencapai fase prima dan IBM Proyonanggan mencapai fase tangguh.

Strategi

1. BNNP Jawa Tengah

- a. Agen pemulihan IBM Purwosari bersama dengan petugas rehabilitasi BNNP Jawa Tengah melakukan pendampingan yang cukup intens kepada klien IBM Purwosari dengan melibatkan dokter dan psikolog klinis Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jawa Tengah.
- b. Petugas rehabilitasi BNNP Jawa Tengah melakukan pendampingan kepada agen pemulihan dan erring mengingatkan agen pemulihan untuk segera menjalankan program IBM.

2. BNNK Cilacap

- a. Koordinasi dan advokasi kepada Desa/Kelurahan pelaksana IBM guna mendukung anggaran operasional IBM
- b. Koordinasi dengan Pembina Fungsi Deputy Bidang Rehabilitasi terkait berjalannya pembinaan 2 Unit IBM
- c. Asistensi dan bimbingan tetap berjalan meskipun tidak menggunakan anggaran DIPA
- d. Advokasi pihak lain/ jejaring guna mendukung berjalannya program IBM

3. BNNK Kendal

- a. Mendamping AP untuk menyusun jadwal perencanaan jadwal layanan IBM;
- b. Mensosialisasikan program IBM agar tokoh masyarakat tidak lagi takut akan adanya program IBM;
- c. Melakukan pendekatan secara personal kepada calon klien;
- d. Edukasi perihal kegiatan IBM

4. BNNK Banyumas

- a. Menjaga komunikasi yang baik, menyampaikan apresiasi dan tetap berkoordinasi untuk dukungan *stakeholder* dalam layanan IBM;
- b. Menyampaikan apresiasi terhadap AP, klien dan keluarga klien terhadap keikutsertaannya dalam layanan IBM;
- c. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk keamanan dari AP dan klien

5. BNNK Purbalingga

- a. IBM Nawasena : telah dilakukan dialog, pendekatan dan penjelasan berkali-kali kepada Kepala Desa bahwa alokasi anggaran untuk IBM memang fokus untuk layanan IBM sehingga partisipasi dari Pemdes atau masyarakat dalam program layanan IBM sangat diperlukan
- b. IBM Dasataka : mendorong agar di tahun 2024 dan seterusnya, Pemdes dapat mengalokasikan anggaran pada APBDes untuk operasionalisasi IBM. Mendorong agar IBM Dasataka dapat bersinergi dengan stakeholders lainnya guna keberlanjutan IBM (Koramil, Polsek, Puskesmas dan lain sebagainya)

6. BNNK Tegal, BNNK Batang dan BNNK Magelang

- a. Melakukan asistensi secara berkala untuk mengetahui perkembangan layanan IBM.
- b. Mengadakan rapat rutin 1 kali per bulan untuk membahas rencana kegiatan IBM serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan.
- c. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait

7. BNNK Surakarta

Melakukan rapat tim dan asistensi terkait jadwal kegiatan dan kegiatan yang telah diberikan terhadap klien.

8. BNNK Temanggung

BNNK Temanggung akan melakukan pemetaan Desa / Kelurahan yang berpotensi rawan penyalahgunaan Narkoba secara masif dan mendalam untuk membentuk IBM yang optimal di tahun berikutnya serta penjelasan secara rinci tentang agen pemulihan kepada Kepala Desa.

8	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
8	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,34	3,67	109,88%

Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah

Definisi Operasional

Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi milik BNN baik rawat inap maupun rawat jalan.

Adapun pengukuran indikator “Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi” Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrument kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.

Hasil

Target 2023 Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi adalah 3,34, dengan realisasi sebesar 3,59. Atau 107,48%.

Tabel 9

INDEKS KEPUASAN LAYANAN REHABILITASI BNNP DAN BNNK JAJARAN 2022-2023

NO	WILAYAH KERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	BNNP Jateng	3,40 Indeks	3,338	3,34 Indeks	3,59
2	BNNK Cilacap	3,20 Indeks	2,967	3,4 Indeks	3,86
3	BNNK Kendal	3,20 Indeks	3,325	3,4 Indeks	3,59
4	BNNK Batang	3,30 Indeks	3,792	3,4 Indeks	3,91

5	BNNK Purbalingga	3,20 Indeks	3,370	3,4 Indeks	3,65
6	BNNK Temanggung	3,20 Indeks	3,370	3,4 Indeks	3,91
7	BNNK Tegal	3,20 Indeks	3,271	3,4 Indeks	3,46
8	BNNK Banyumas	3,20 Indeks	3,488	3,4 Indeks	3,93
9	BNNK Surakarta	3,20 Indeks	3,553	3,4 Indeks	3,67
10	BNNK Magelang	3,20 Indeks	3,459	3,4 Indeks	3,69

Kendala

1. BNNP Jawa Tengah

Banyak klien yang tidak sesuai kriteria, terutama kriteria kedatangan (beberapa klien kurang dari 3 kali kedatangan)

2. BNNK Cilacap

- Klien kurang berkonsentrasi saat pengisian Survei kepuasan masyarakat
- Aspek tahap perubahan klien mempengaruhi saat pengisian survei karena klien yang mengisi baru mendapat 2-3 kali layanan.

3. BNNK Banyumas

- Pengisian indeks melalui daring;
- Kemampuan partisipan dalam memahami pernyataan pada kuisisioner indeks kepuasan layanan rehabilitasi.

4. BNNK Kendal dan BNNK Surakarta

Responden/ klien kurang memahami dalam pengisian instrument sehingga petugas harus melakukan pendampingan untuk menjelaskan maksud dari kuesioner

5. BNNK Purbalingga

- Adanya beberapa klien dibawah usia 18 Tahun sehingga Hanya sedikit klien yang masuk kriteria inklusi, belum bisa menggambarkan keseluruhan layanan
- Aspek tahap perubahan klien mempengaruhi saat pengisian survei karena klien yang mengisi baru mendapat 2-3 kali layanan (belum selesai menjalani seluruh tahapan layanan rehabilitasi)
- Dalam pengisian klien butuh pendampingan

6. BNNK Tegal, BNNK Batang dan BNNK Magelang

- Survey dilakukan secara online, sehingga ada kendala berupa koneksi internet dan beberapa klien kurang memahami bagaimana mengisi kuesioner secara online.
- Klien kurang memahami pertanyaan dalam kuesioner

Strategi

1. BNNP Jawa Tengah

Menghubungi klien untuk datang sesuai jadwal

2. BNNK Cilacap

- a. Memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait pengisian survei kepuasan terhadap klien.
 - b. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan guna mewujudkan layanan prima bagi klien.
3. BNNK Banyumas
- a. Menyediakan kuisisioner secara *hardcopy*;
 - b. Memfasilitasi *free* wi-fi dan media (*smartphone* dan atau komputer) untuk pengisian kuisisioner;
 - c. Melakukan pendampingan selama partisipan mengisi kuisisioner.
4. BNNK Kendal dan BNNK Surakarta
- Petugas memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami responden dalam pengisian kuisisioner
5. BNNK Purbalingga
- a. Koordinasi detail teknis dengan pembina fungsi terkait kondisi tersebut
 - b. Petugas BNNK Purbalingga mendampingi klien dalam pengisian
6. BNNK Tegal, BNNK Batang dan BNNK Magelang
- a. Melakukan pendampingan pada saat klien melakukan pengisian kuisisioner
 - b. Melakukan pengisian survey secara manual dan selanjutnya di input ke dalam link survey online oleh petugas BNNK

Selain indikator kerja yang tersebut dalam tabel 1 sampai dengan tabel 6, BNNP dan BNNK memiliki program rehabilitasi yang tertuang dalam DIPA BNN. Kegiatan yang termasuk dalam DIPA BNN berupa rawat jalan, Skrining Intervensi Lapangan (SIL), SKHPN dan sebagainya. Berikut capaian pelaksanaan program tersebut:

Tabel 9
Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik BNNP dan BNNK/ Kota

No	Wilayah	Target (orang)	Capaian (orang)	Selesai Program (orang)	Rujuk (orang)	DO (orang)	Tahapan Bina Lanjut (orang)
1	BNNP Jateng	65	78	24	2	20	24
2	BNNK Cilacap	20	24	20	2	2	15
3	BNNK Kendal	10	13	13	0	0	13
4	BNNK Batang	15	26	19	1	6	23
5	BNNK Purbalingga	20	23	23	1	1	19
6	BNNK Temanggung	10	28	10	8	10	10
7	BNNK Tegal	15	15	14	0	0	9
8	BNNK Banyumas	20	33	9	7	5	7
9	BNNK Surakarta	20	20	8	2	0	10
10	BNNK Magelang	20	45	37	2	6	29
TOTAL		215	305	177	25	50	159

Kendala

- BNNP Jawa Tengah dan BNNK Temanggung
Beberapa klien tidak menyelesaikan program rehabilitasinya (DO)
- BNNK Purbalingga
 - a. Klien tidak selesai menjalani layanan rehabilitasi berkelanjutan karena ada aktivitas lain di luar kota (kerja/melanjutkan pendidikan)
 - b. Klien hilang kontak (ganti nomor)

Strategi

- BNNP Jawa Tengah
Menghubungi klien yang tidak kembali ke layanan
- BNNK Temanggung
 - a. Menghubungi klien yang tidak kembali ke layanan
 - b. Menghubungi keluarga/ mengingatkan klien tentang jadwal rehabilitasi
 - c. Membuat kesepakatan di luar jadwal
- BNNK Purbalingga
Tetap menghubungi klien / keluarganya setidaknya agar terpantau secara virtual.

Tabel 10
Layanan Asesmen Medis, SKHPN, Evaluasi Psikologi Tipe A dan Evaluasi Psikologi Tipe B di Klinik BNNP dan BNNK/ Kota

No	Instansi	Asesmen Medis		SKHPN		Evaluasi Psikologi Tipe A		Evaluasi Psikologi Tipe B	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	BNNP Jawa Tengah	0	0	269	269	5	0	5	2
2	BNNK Kendal	0	0	300	348	0	0	0	0
3	BNNK Batang	0	0	200	288	0	0	0	0
4	BNNK Tegal	0	0	75	88	0	0	0	0
5	BNNK Purbalingga	0	1	150	150	0	0	0	0
6	BNNK Temanggung	0	0	60	71	0	0	0	0
7	BNNK Banyumas	0	0	310	318	0	0	0	0
8	BNNK Cilacap	0	0	100	102	0	0	0	0
9	BNNK Surakarta	0	0	255	261	0	0	0	0
10	BNNK Magelang	0	0	250	265	0	0	0	0
Total		0	1	1969	2160	5	0	5	2

Kendala

- BNNP Jawa Tengah
Belum ada yang mengakses layanan Evaluasi Psikologi Tipe A
- BNNK Temanggung
Pemohon SKHPN tidak rutin (tidak setiap hari ada)
- BNNK Purbalingga
Pemohon SKHPN tidak rutin / terjadwal, tergantung permintaan

Strategi

- BNNP Jawa Tengah
Koordinasi dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan evaluasi psikologi tipe A
- BNNK Temanggung
Melakukan sosialisasi layanan SKHPN
- BNNK Purbalingga
Publikasi layanan penerbitan PNPB SKHPN melalui medsos

Table 12
Kegiatan SIL

NO	WILAYAH	KLIEN YANG MENGAKSES LAYANAN SIL	KLIEN SIL YANG MENGIKUTI PROGRAM REHAB DI KLINIK	
			TARGET	CAPAIAN
1.	BNNP Jateng	2	1	1
2.	BNNK Kendal	6	6	6
3.	BNNK Batang	15	15	15
4.	BNNK Tegal	5	5	5
5.	BNNK Purbalingga	200	20	15
6.	BNNK Temanggung	10	10	10
7.	BNNK Banyumas	0	0	0
8.	BNNK Cilacap	0	0	0
9.	BNNK Surakarta	0	0	0
10.	BNNK Magelang	172	12	29
TOTAL		410	69	81

Kendala

- BNNK Purbalingga
 - a. Calon klien yang potensial untuk dilibatkan pada layanan rehabilitasi melalui program SIL mayoritas pengguna minuman keras (alkohol) sehingga tidak masuk dalam target klien Klinik Pratama BNNK Purbalingga. Beberapa diantaranya memang ada yang dapat dilibatkan dalam layanan rehabilitasi rawat jalan Klinik Pratama BNNK Purbalingga karena penggunaan zat adiktif (kecubung, bunga terompet)
 - b. Petugas rehabilitasi BNNK Purbalingga terbatas dan mengampu tugas lainnya

- c. Lokasi geografis Kabupaten Purbalingga mayoritas dataran tinggi dan pedesaan

Strategi

- BNNK Purbalingga
 - a. Komunisasi Informasi Edukasi (KIE) bahaya rokok dan alkohol pada sasaran SIL
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melibatkan Puskesmas dalam pemberian edukasi bahaya zat adiktif

Pemanfaatan medsos dan aplikasi Si Bangga guna perluasan aksesibilitas layanan rehabilitasi sehingga menembus jarak, ruang dan waktu serta mudah diakses

Kendala

1. BNNK Cilacap
 - a. Mayoritas klien dibawah usia 18 Tahun sehingga Hanya sedikit klien yang masuk kriteria inklusi, belum bisa menggambarkan keseluruhan layanan.
 - b. Aspek tahap perubahan klien mempengaruhi saat pengisian survei karena klien yang mengisi baru mendapat 2-3 kali layanan.
2. BNNK Tegal

Tools terlalu banyak sehingga klien dalam pengisian perlu didampingi.
3. BNNK Kendal

Tools terlalu banyak sehingga klien dalam pengisian perlu didampingi.
4. BNNK Magelang

Beberapa klien kesulitan mengisi survey secara online karena kendala device ataupun jaringan internet.

Strategi

1. BNNK Cilacap

Koordinasi dengan pembina fungsi terkait kondisi di BNNK Cilacap.
2. BNNK Tegal

Petugas mendampingi klien dalam pengisian survey agar klien tidak bingung.
3. BNNK Kendal

Petugas mendampingi klien dalam pengisian tools agar klien tidak bingung
4. BNNK Magelang

Melakukan pengisian survey secara manual dan selanjutnya di input ke dalam link survey online oleh petugas.

Selain indikator kerja yang tersebut dalam tabel di atas BNNP dan BNNK memiliki program rehabilitasi yang tertuang dalam DIPA BNN. Kegiatan yang termasuk dalam DIPA BNN berupa rawat jalan, asesmen medis, Skrining Intervensi Lapangan (SIL), SKHPN dan sebagainya. Berikut capaian pelaksanaan program tersebut :

Tabel 13
PROGRAM REHABILITASI BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	WILAYAH	TAR GET	CAPAIAN	SELESAI PROGRAM	RUJUK	DO	TAHAPAN BINA LANJUT
		ORANG					
1	BNNP Jateng	60	70	27	2	11	0
2	BNNK Cilacap	15	21	11	0	5	10
3	BNNK Kendal	15	18	18	0	0	16
4	BNNK Batang	15	35	12	1	2	12
5	BNNK Purbalingga	20	27	23	1	3	20
6	BNNK Temanggung	10	22	4	4	0	4
7	BNNK Tegal	15	15	15	0	0	15
8	BNNK Banyumas	35	46	25	3	12	10
9	BNNK Surakarta	20	22	5	1	3	7
10	BNNK Magelang	20	35	33	1	1	17
TOTAL		225	311	173	13	37	111

Kendala

1. BNNP Jawa Tengah

Beberapa klien tidak menyelesaikan program rehabilitasinya (DO), dan 30 klien masih dalam proses rehab

2. BNNK Tegal

Ruang konseling kurang nyaman, plafond jebol dan wallpaper mengelupas

3. BNNK Cilacap

Izin operasinal masih dalam proses perpanjangan

4. BNNK Kendal

1. Klien tidak konsisten dalam kedatangan untuk program rehabilitasi

2. Ada kegiatan – kegiatan di luar kegiatan rehabilitasi yang mengganggu jadwal klien untuk rehabilitasi

Strategi

1. BNNP Jawa Tengah

Menghubungi klien yang tidak kembali ke layanan

2. BNNK Tegal

Akan dilakukan perbaikan

3. BNNK Cilacap

Koordinasi dengan dinas terkait guna percepatan surat izin operasional

4. BNNK Kendal

1. Menghubungi keluarga/ mengingatkan klien tentang jadwal rehabilitasi
2. Membuat kesepakatan di luar jadwal

Tabel 10

**LAYANAN ASESMEN MEDIS, SKHPN, EVALUASI PSIKOLOGI TIPE A DAN TIPE B
BNNP DAN BNNK JAJARAN**

NO	SATUAN KERJA	ASESMEN MEDIS		SKHPN		EVALUASI PSIKOLOGI TIPE A		EVALUASI PSIKOLOGI TIPE B	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	BNNP Jawa Tengah	0	0	750	634	5	0	5	2
2	BNNK Kendal	0	0	300	320	0	0	0	0
3	BNNK Batang	0	0	400	316	0	0	0	0
4	BNNK Tegal	0	0	100	108	0	0	0	0
5	BNNK Purbalingga	0	0	150	153	0	0	0	0
6	BNNK Temanggung	0	4	100	100	0	0	0	0
7	BNNK Banyumas	0	0	250	230	0	0	0	0
8	BNNK Cilacap	2	2	100	109	0	0	0	0
9	BNNK Surakarta	0	0	300	280	0	0	0	0
10	BNNK Magelang	2	6	260	303	0	0	0	0
TOTAL		4	12	2710	2553	5	0	5	2

T: Target/R:Realisasi

Kendala

1. BNNP Jawa Tengah

Belum ada yang mengakses layanan Evaluasi Psikologi Tipe A.

2. BNNK Surakarta

Pemohon SKHPN tidak rutin (tidak setiap hari ada).

3. BNNK Kendal

Bendahara pengeluaran belum memahami tugasnya dalam pencairan anggaran PNBPN sehingga masih kesulitan dalam pencairan PNBPN.

Strategi

1. BNNP Jawa Tengah

Koordinasi dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan evaluasi psikologi tipe A.

2. BNNK Surakarta

Melakukan sosialisasi layanan SKHPN.

3. BNNK Kendal

Terus berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran terkait pencairan dan pembuatan SPJ pencairan anggaran PNPB yang ada dalam DIPA.

Tabel 11
SIL BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	WILAYAH	KLIEN YANG MENGAKSES LAYANAN SIL	KLIEN SIL YANG MENGIKUTI PROGRAM REHAB DI KLINIK	
			TARGET	CAPAIAN
1.	BNNP Jateng	2	2	2
2.	BNNK Kendal	13	10	13
3.	BNNK Batang	59	15	17
4.	BNNK Tegal	8	5	8
5.	BNNK Purbalingga	139	10	20
6.	BNNK Temanggung	10	10	10
7.	BNNK Banyumas	322	5	26
8.	BNNK Cilacap	15	15	15
9.	BNNK Surakarta	18	10	8
10.	BNNK Magelang	132	10	20
TOTAL		718	92	139

Kendala

1. BNNK Batang

Klien hasil SIL banyak yang hanya menggunakan minuman keras dan rokok.

2. BNNK Cilacap

a. Kesibukan petugas dengan tugas lain.

b. Anggaran SIL masuk dalam anggaran yang dilakukan Automatic Adjustment.

3. BNNK Surakarta

Klien masih ragu untuk mengakses layanan rehabilitasi di Klinik.

4. BNNK Kendal

a. Keluarga masih ketakutan ketika didatangi petugas.

b. Lokasi yang terkadang susah untuk dijangkau.

Strategi

1. BNNK Batang

Pemberian intervensi singkat yaitu edukasi tentang bahaya penggunaan narkoba, miras dan dampak negatif rokok.

2. BNNK Cilacap
 - a. Koordinasi dengan relawan/penggiat P4GN disekitar daerah tersebut.
 - b. Tetap melaksanakan SIL sambil menunggu pembukaan.
3. BNNK Surakarta

Menghubungi kembali klien yang telah dilakukan skrining.

 - a. BNNK Kendal
 - a. Memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai tujuan kedatangan.
 - b. Membuat janji di tempat yang mudah diakses.

Berikut realisasi anggaran Triwulan IV di wilayah kerja BNNP Jawa Tengah dan BNNK:

Tabel 12

REALISASI ANGGARAN REHABILITASI BNNP DAN BNNK JAJARAN

SATKER	3259 (000)			3260 (000)			3256 (000)			TOTAL		
	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
BNNP Jawa Tengah	179.666	179.094	100	247.508	228.037	92	46.155	43.978	95	473.329	451.109	95
BNNK Kendal	10.840	10.840	100	147.338	147.338	100	12.790	12.790	100	170.968	170.913	100
BNNK Batang	10.650	10.650	100	156.818	145.210	93	21.947	20.955	100	189.415	176.815	93
BNNK Tegal	20.031	20.030	100	114.375	112.580	98	13.205	13.205	100	147.611	145.815	99
BNNK Purbalingga	10.770	10.770	100	130.552	130.548	100	14.650	14.650	100	155.972	155.968	100
BNNK Temanggung	10.450	10.450	100	105.175	105.132	100	10.200	10.200	100	125.825	125.782,8	100
BNNK Banyumas	10.885	10.885	100	183.659	183.658	100	19.904	19.904	100	214.488	214.447	100
BNNK Cilacap	14.500	14.410	99	136.660	136.345	100	20.590	20.589	100	171.750	171.344	100
BNNK Surakarta	9.877	9.877	100	164.455	161.460,6	98	7.850	7.850	100	182.182	179.187	98
BNNK Magelang	10.660	10.660	100	159.096	141.381	89	25.557	25.557	100	195.313	177.598	91
TOTAL	288.329	287.66	100	1.545.636	1.491.637	97	192.848	189.678	98	2.026.813	1.968.981	97

P:Pagu/R:Realisasi

Program Rehabilitasi di Lembaga Masyarakat dan Sekolah

Selain kegiatan – kegiatan yang masuk dalam DIPA, BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNNK di wilayah Jawa Tengah bekerjasama dengan Lapas untuk menjalankan program rehabilitasi di Lapas, diantaranya Lapas Klas I Semarang (Lapas Kedungpane), Lapas Klas II A Perempuan, Lapas Nusa Kambangan, Lapas Kelas IIA Magelang, Rutan Kelas IIB Wonosobo. BNNK PURBALINGGA melaksanakan koordinasi dengan Cabdin IX Dindik Provinsi Jateng agar dapat dilakukan “BNN MASUK SEKOLAH” berupa layanan rehabilitasi on the spot di Kabupaten Banjarnegara. Disamping itu juga menjalin MoU

dengan beberapa sekolah: SMK Soedirman Purbalingga, SMP N 4 Satu Atap Karangjambu dan SMP N 4 Kutasari untuk layanan rehabilitasi on the spot.

9	Sasaran Strategis	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
9	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta jaringan	100%

Definisi Operasional

Melakukan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah tupoksi Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tupoksi tersebut, Seksi Intelijen menggunakan berbagai macam metode guna mendapatkan Peta Jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Metode yang digunakan antara lain adalah pengumpulan bahan, keterangan informasi, dan menerima laporan informasi dari masyarakat langsung maupun melalui call center BNN dan lain sebagainya. Dari berbagai informasi yang didapatkan, Seksi Intelijen melakukan pengolahan dan analisa baik secara penyelidikan manual atau analisis intelijen berbasis teknologi dari unsur-unsur keterangan. Apabila unsur-unsur keterangan dapat dipertanggung jawabkan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti Seksi Intelijen BNN Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk Tim Intelijen untuk melakukan penyelidikan kepada Target.

Dalam melakukan Penyelidikan, Tim Intelijen melakukan penyamaran, profiling, pembuntutan dan lain-lain untuk mengetahui seluruh informasi mengenai Target. Seluruh informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan rencana dan cara bertindak sehingga memberikan hasil yang optimal.

Hasil

Hasil yang dicapai oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah melakukan ungkap kasus dan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selama Januari – Desember 2023 Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah berhasil melakukan 8 kali ungkap kasus kasus narkoba dengan 12 tersangka tindak pidana narkoba.

Kendala

Kedala yang dihadapi oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja tim analis (contohnya pelatihan khusus analisis) dan tim lapangan (khususnya kebutuhan alat Direction Finder), juga kurangnya akses kerjasama yang lebih mudah dengan provider-provider juga meningkatnya penggunaan sosial media sebagai sarana komunikasi yg sulit terdeteksi.

Strategi

Strategi yang dilakukan oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah dengan melakukan pendekatan, penggalangan kepada provider-provider, TNI, POLRI, Bea Cukai, Kantor Pos, instansi-instansi pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat, juga mengajukan permohonan pengadaan alat *Direction Finder* ke BNN RI. Strategi yang dilakukan oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah dengan melakukan pendekatan, penggalangan kepada provider-provider, TNI, POLRI, Bea Cukai, Kantor Pos, instansi-instansi pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat, juga mengajukan permohonan pengadaan alat Direction Finder ke BNN RI.

10	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
-----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
10	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas Perkara	21 Berkas Perkara	105%

**9 berkas perkara BNNP Jateng, BNNK (Banyumas) 2 berkas perkara, 8 BNNK masing-masing 1 berkas perkara.*

Definisi Operasional

Melakukan proses penyidikan dalam kelengkapan berkas perkara dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai proses penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada Kejaksaan.

Hasil

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang sudah P-21 periode Januari s.d Desember 2023 ada 9 berkas yang ditangani BNNP dan 12 berkas yang ditangani BNNK.

Berkas yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 3 berkas perkara oleh penyidik BNNP Jawa Tengah dan 1 berkas perkara oleh BNNK Batang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 13
DATA LAPORAN KASUS NARKOTIKA BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	SATKER BNNP/BNNK	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P- 21
1	BNNP JAWA TENGAH	LKN /0005- NAR/II/2023/B NNP Jawa Tengah	1. Berkas 1	1 AGUS PRIYO SANTOSO Alias Agoes Lt Alias LONTONG Bin SUNGKON O	P21	Februari 2023	Mei 2023
		LKN /0007- NAR/III/2023/B NNP Jawa Tengah	1. Berkas 1	1 AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMM AD SADJAD	P21	Maret 2023	Mei 2023
		LKN /0010- NAR/V/2023/B NNP Jawa Tengah	1. Berkas 1	1 ALBERTUS TOMMY BUDIONO Alias TOMNS Anak dari BUDIONO HADISUTIK NO	P21	Mei 2023	Agustus 2023
			2. Berkas 2	2 HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN	P21	Mei 2023	Agustus 2023
		LKN /0013- NAR/VII/2023/ BNNP Jawa Tengah	1. Berkas 1	1 LUSI NANDIA WARDANI Binti JFX. SAMUDSI (Alm)	P21	Juli 2023	September 2023
			2. Berkas 2	2 DONY CATUR RIANTO Bin MOCH YASIN	P21	Juli 2023	September 2023
		LKN /0014- NAR/VII/2023/ BNNP Jawa Tengah	1. Berkas 1	1 MARHAEN DRA CAHYA PRADITYA HERENZA Bin HERU PRASETYO	P21	Juli 2023	Oktober 2023
		LKN /0015- NAR/VIII/2023/ BNNP Jawa Tengah	1. Berkas 1	1 RESNA NOVIANTO Bin (Alm) JAMIN	P21	Agustus 2023	November 2023

			2. Berkas 2	2 ZAINAL ABIDIN Bin M. YAHYA	P21	Agustus 2023	November 2023
		LKN /0018- NAR/XI/2023/B NNP Jawa Tengah	1. Berkas 1	1 ANDRI NUGROHO Bin SUMARNO	Proses Penyidik an	November 2023	-
		LKN /0019- NAR/XI/2023/B NNP Jawa Tengah	1. Berkas 1	1 ANGGIT DWI ANGGRAIT O Bin SUPARDI	Proses Penyidik an	Desember 2023	-
			2. Berkas 2	2 ARI TRI WIBOWO Als ARI DOM Bin SRI HARTOYO	Proses Penyidik an	Desember 2023	-
2	BNN KABUPATEN KENDAL	LKN /0009- NAR/V/2023/B NN Kab. Kendal	1. Berkas 1	1 BERNARD KRISTIAN YULES EDUARD Alias LONDO Bin MARI YULES KAREL EDUARD DG	P21	Mei 2023	Juli 2023
3	BNN KABUPATEN BATANG	LKN /0002- NAR/I/2023/BN N Kab.Batang	1. Berkas 1	1 UNTUNG BUDI SANTOSO Alias UNTAG Bin (Alm) SUDARMO	P21	Januari 2023	Maret 2023
			2. Berkas 2	2 JECKY ZAM ZAMI Alias KOMISI Bin (Alm) H. ABDUL FATAH ZAM ZAMI	P21	Januari 2023	Maret 2023
4	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	LKN /0008- NAR/V/2023/B NN Kab. Purbalingga	1. Berkas 1	1 GUNANJAR ARIFIN Alias IGUN Bin TUGITO	P21	Mei 2023	Juni 2023
5	BNN KABUPATEN BANYUMAS	LKN/0006- NAR/III/2023/B NN Kab. Banyumas	1. Berkas 1	1 RIDHO DEXAL ITSNAN Bin HERU PRABOWO	Diversi	Maret 2023	-
			2. Berkas 2	2 JULIAN RIDHO ISHFAHAN Y Bin AGUS YULIANTO	Diversi	Maret 2023	-
		LKN/0016- NAR/X/2023/B NN Kab. Banyumas	1. Berkas 1	1 ACH MAHFUD Bin SUPA'I	P21	Oktober 2023	Oktober 2023

		LKN/0017-NAR/XI/2023/BNN Kab. Banyumas	1. Berkas 1	1 IQBAL MUNAFI MA'ARIF Bin SAMSUL MA'ARIF	Proses Penyidik an	November 2023	-
6	BNN KABUPATEN CILACAP	LKN/0012-NAR/VI/2023/BNN Kab. Cilacap	1. Berkas 1	1 SUGIARTO Alias JHON Bin (Alm) SUBARI	P21	Juni 2023	Oktober 2023
7	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	LKN/0011-NAR/V/2023/BNN Kab. Temanggung	1. Berkas 1	1 SEKAR NINGRUM KUSUMA MURTI Binti WISNU HANDANA KUSUMA	P21	Mei 2023	Agustus 2023
			2. Berkas 2	2 ARIP WIDODO Bin (Akm) SUHERI	P21	Mei 2023	Agustus 2023
8	BNN KOTA TEGAL	LKN /0003-NAR/II/2023/BNN Kota Tegal	1. Berkas 1	1 SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUEK Bin IMAN ARIFIN	P21	Februari 2023	Mei 2023
9	BNN KOTA SURAKARTA	LKN /0004-NAR/II/2023/BNN Kota Surakarta	1. Berkas 1	1 INDRA GUNAWAN Als WW anak dari TAN EENG	P21	Februari 2023	Maret 2023
10	BNN KABUPATEN MAGELANG	LKN /0001-NAR/I/2023/BN N Kab. Magelang	1. Berkas 1	1 WIJAYA Bin ISKANDAR EFENDI	P21	Januari 2023	Mei 2023
			2. Berkas 2	2 ANDRI WIDODO Bin BAMBANG	P21	Januari 2023	Mei 2023

Kendala

Dalam proses pengembangan penyidikan terhadap atasan/bos tersangka menemui kesulitan karena penggunaan sosial media (whatsapp, dll) sebagai alat komunikasi yg menghambat deteksi komunikasi tersangka dengan atasannya. Dalam 1 Jaringan antar tersangka tidak mengenal secara fisik.

Strategi

Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Labfor Forensik ataupun lainnya, juga peningkatan kemampuan bagi anggota lapangan dan penyidik.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
11	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100%

Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- Melaksanakan perawatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng dalam kasus P4GN.
- Melaksanakan pengawasan dalam waktu 1x24 jam selama tersangka ditahan di BNNP Jateng.
- Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng secara berkala terhadap tahanan dari peralatan mandi, pakaian dan keperluan yang lain.
- Pemberian kebutuhan makanan dan minuman (3x / hari) secara rutin.
- Melaksanakan sidak terhadap tahanan yang ditahan di BNNP Jateng.

Hasil

- Pada periode bulan Januari s.d Desember 2023, kegiatan yang telah dilaksanakan sie Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan tugas pengiriman tersangka guna penitipan selama proses penyidikan.
- Melaksanakan tugas pengambilan tersangka guna penyerahan tersangka dan BB kepada JPU .
- Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada semua tahanan.
- Melaksanakan pengawasan selama tersangka ditahan di BNNP Jateng

Kendala

- Dalam melaksanakan perawatan, pengawasan tahanan sarana dan prasarannya serba terbatas, khususnya petugas jaga.
- Medis yang ada di BNNP Jateng kurang cepat dalam menangani tahanan apabila mengalami gangguan kesehata karena belum ada dokter khusus yang menangani tahanan.

- c. Banyaknya permintaan Layanan Asesmen Terpadu (TAT) yang melebihi target anggaran. Target awal tahun 40 layanan. Sudah melayani 218 layanan.

Strategi

- a. Berupaya untuk berkoordinasi dengan Pegadaian, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas dan Kejaksaan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan piket jaga tahanan harian oleh semua anggota bidang pemberantasan di bantu anggota k-9 dan security.
- c. Berupaya untuk berkoordinasi dengan Pegadaian, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas dan Kejaksaan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- d. Mengajukan permohonan penambahan anggaran Layanan Asesmen Terpadu (TAT)

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba

Definisi Operasional

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- a. Melaksanakan pendataan, pengamanan dan pengawasan barang bukti berupa narkoba dan non narkoba.
- b. Melaksanakan penyimpanan barang bukti narkoba dalam almari brankas.
- c. Melaksanakan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh instansi terkait (Balai POM, Kejaksaan, Puslabfor Polri, Ditresnarkoba dan Dinas Kesehatan)

Hasil

Pada periode bulan Januari s.d Desember 2022, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- b. melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- c. melaksanakan tugas pengamanan BB dlm proses penimbangan BB Narkotika guna penimbangan BB.
- d. melaksanakan 3 kali pemusnahan BB Narkotika selama Januari s.d Desember 2023.
- e. melakukan pendataan barang bukti.

Kendala

- a. Kurangnya personel Pengawas Barang bukti di BNNP Jateng, sehingga pengawasannya masih dibantu oleh personel dari lain seksi khususnya staff sie penyidik dan staf intelijen.

- b. Belum adanya ruangan khusus yang digunakan untuk pengamanan dan penyimpanan brankas barang bukti.

Strategi

- a. Mengajukan permohonan ke bagian umum agar dapat dibuatkan ruangan khusus penyimpanan barang bukti.
- b. Berupaya untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri/Tinggi, Pengadilan Negeri/Tinggi dan Lapas demi kelancaran proses Penyidikan sampai Barang bukti dimusnahkan dihadapan instansi berwenang.

12	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
-----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
12	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Berkas	0 Berkas	0%

Definisi Operasional

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan setelah mendapat bukti-bukti Laporan Hasil Analisis dari PPATK ataupun setelah dilakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Analisis terlebih dahulu ataupun penyelidikan terhadap aset-aset tersangka narkoba. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh Penyidik adalah berupa penelitian laporan hasil analisis atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor.

Hasil

Jumlah tindak pidana pencucian uang yang ditangani BNN Provinsi Jawa Tengah sudah P-21 adalah 0 berkas perkara. Sedangkan dalam proses penyelidikan adalah 2 target.

Kendala

Kerjasama dengan beberapa Bank yang belum terjalin sempurna menghambat proses penyidikan dan pengembangan kasus dalam rangka pencarian aset tersangka, dan beberapa instansi yang belum mempunyai MOU dengan BNN terkait TPPU contohnya BPN dan POLDA.

Target penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika sebanyak 2 berkas perkara tidak tercapai karena:

Pada bulan Mei 2023, Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyelidikan dugaan TPPU Narkotika dengan Target Operasi Pemilik Rekening BCA an. Ratnasari karena mendapatkan aliran dana dari pelaku TPPU Narkotika bernama Andi Widiarti. Setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa rekening BCA an. Ratnasari digunakan oleh seorang Narapidana di LP Permisan Nusakambangan bernama Dicky Abert Nego. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Dicky Abert Nego ternyata yang bersangkutan sedang mengalami gangguan kejiwaan dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, aset yang dikuasai jumlahnya sekarang sudah tidak signifikan dikarenakan jarak kasus tindak pidana narkotika asal yang sudah terlalu lama (2018) sehingga Penyidik tidak melanjutkan kasusnya ke Tahap Penyidikan.

Strategi

Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPATK, pihak Bank, BPN dan lembaga keuangan lainnya terkait penelusuran aset.

Bahwa pada bulan November 2023 Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jateng melakukan penyelidikan dugaan TPPU Narkotika dengan Target Operasi bernama Zainal Abidin. Dari penyelidikan ditemukan dugaan awal telah terjadi TPPU Narkotika dan beberapa aset berupa 2 rekening berisi tabungan senilai Rp. 400 juta telah diblokir dan 1 unit apartemen di Medan sudah diblokir. Namun karena mepetnya waktu berakhirnya tahun anggaran 2023 maka setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat TPPU BNN maka diarahkan untuk pembukaan LKN TPPU dilakukan di awal tahun 2024 dan anggaran penyidikan TPPU tahun 2023 direvisi untuk penyelidikan TPPU untuk mempertajam pembuktian perkara.

13	Sasaran Strategis	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
-----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
13	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	82 Indeks	77,87 Indeks	94,96%

	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	1 BNN Kabupaten/ Kota	11,11%
--	--	-----------------------	-----------------------	--------

Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah

Definisi Operasional

Nilai Kinerja anggaran adalah nilai aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran kinerja anggaran kementerian dan lembaga. Nilai kinerja anggaran BNN merupakan nilai akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja aspek Implementasi satker yang ada di aplikasi smart Kemenkeu selama 1 (satu) tahun hingga menjadi capaian kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah beserta BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, terdiri dari aspek penyerapan anggaran, konsistensi atas RPD baik awal maupun akhir, capaian keluaran/output dan efisiensi.

Hasil

Realisasi kinerja anggaran sudah terukur dan terdeteksi di aplikasi SMART Kemenkeu, belum terealisasinya anggaran secara maksimal dikarenakan ada beberapa anggaran di BNNP Jawa Tengah tidak dapat terserap. Apabila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

Tabel 14
PERBANDINGAN CAPAIAN NKA



Sebagai tindak lanjutnya maka di tahun yang akan datang perlu meningkatkan efisiensi anggaran dan meningkatkan capaian output.

Kendala

Belum adanya penilaian terkait aspek manfaat.

Strategi

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan

Jumlah BNN Kabupaten/ Kota Di Wilayah Provinsi Dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target

Tabel 15
DATA CAPAIAN NKA BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	SATKER	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
1	BNN Provinsi Jawa Tengah	89	81,74	82	77,87	94,92%
2	BNN Kabupaten Kendal	87	85,62	86	86,74	100,86%
3	BNN Kabupaten Batang	87	87,20	88	87,10	98,97%
4	BNN Kabupaten Purbalingga	93	94,27	92	82,73	89,92%
5	BNN Kabupaten Cilacap	87	87	88	86,75	98,57%
6	BNN Kabupaten Temanggung	88	94,52	92	86,36	93,86%
7	BNN Kabupaten Banyumas	87	93,12	92	86,83	94,38%
8	BNN Kota Tegal	87	88,40	89	88,33	99,24%
9	BNN Kota Surakarta	87	93,48	92	86,36	93,86%
10	BNN Kabupaten Magelang	93	98,65	92	86,50	94,02%

Realisasi kinerja anggaran sudah terukur dan terdeteksi di aplikasi SMART Kemenkeu, belum terealisasinya anggaran secara maksimal dikarenakan ada beberapa anggaran di BNNP Jawa Tengah tidak dapat terserap.

14

Sasaran Strategis

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	92 Indeks	96,20 Indeks	104,56%
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	9 BNN Kabupaten/ Kota	100 %

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah

Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variable: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, Kesalahan SPM.

Terselesaikannya kegiatan program dan anggaran Tahun 2022 di BNN Provinsi Jawa Tengah karena:

- Optimalisasi anggaran yang diikuti dengan revisi anggaran yang tepat melalui koordinasi dengan BNN RI dan Bagian/ Bidang yang ada di BNN Provinsi Jawa Tengah;
- Konsultasi yang intensif dengan KPPN Semarang II;
- Komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan.

Tabel 16
CAPAIA IKPA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	134	066	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	65.95	100.00	100.00	100.00	96.01	100.00	100.00	96.20	100%	96.20
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.60	20.00	10.00	10.00	9.60	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.98		99.20					100.00			

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNNK Jajaran seluruhnya mencapai target sebesar 92.

Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target

Tabel 17
CAPAIAN IKPA BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	SATKER	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
1	BNN Provinsi Jawa Tengah	95	97,03	92	95,32	103,60%
2	BNN Kabupaten Kendal	95	96,97	92	99,15	107,77%
3	BNN Kabupaten Batang	95	97,70	92	97,46	105,93%
4	BNN Kabupaten Purbalingga	95	97,81	92	99,06	107,67%
5	BNN Kabupaten Cilacap	95	98,52	92	97,20	105,65%
6	BNN Kabupaten Temanggung	95	97,42	92	97,69	106,18%
7	BNN Kabupaten Banyumas	95	97,52	92	98,10	106,63%
8	BNN Kota Tegal	95	98,90	92	99,07	107,68%
9	BNN Kota Surakarta	95	98,55	92	97,36	105,82%
10	BNN Kabupaten Magelang	95	97,48	92	96,86	105,28%

Dengan capaian tersebut maka target jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA memenuhi target adalah sebanyak 9 (sembilan) BNN Kabupaten/Kota.

15	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal
-----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
15	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	85 Indeks	85,02 Indeks	100,02%

Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal

Definisi Operasional

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pembangunan

Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Tujuan dari pembangunan Zona Integritas ini adalah membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Hasil

Pada 21 Desember 2020 BNN Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan pelaksanaan zona integritas BNNP Jawa Tengah Tahun 2023 ini dinilai oleh Tim Penilai Internal BNN RI, dengan hasil sebagai berikut.

SATUAN KERJA	HASIL PENILAIAN TPI			
	PEMENUHAN	REFORM	HASIL	JUMLAH
BNNP Jawa Tengah	24.67	24.43	35.92	85.02

Kendala

Dalam pelaksanaan zona integritas BNNP Jawa Tengah mengalami kendala karena adanya perubahan Pimpinan maupun sering terjadinya mutasi pegawai yang terlibat dalam pembangunan zona integritas. Selain itu tidak adanya dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA BNNP Jawa Tengah.

Strategi

Membentuk kembali Tim Zona Integritas dengan pegawai eksisting BNNP Jawa Tengah dan berkoordinasi dengan Inspektorat Utama maupun Biro Perencanaan Setda BNN mengusulkan adanya dukungan anggaran khusus untuk dapat mendukung pembangunan zona integritas.

B. Akuntabilitas Keuangan

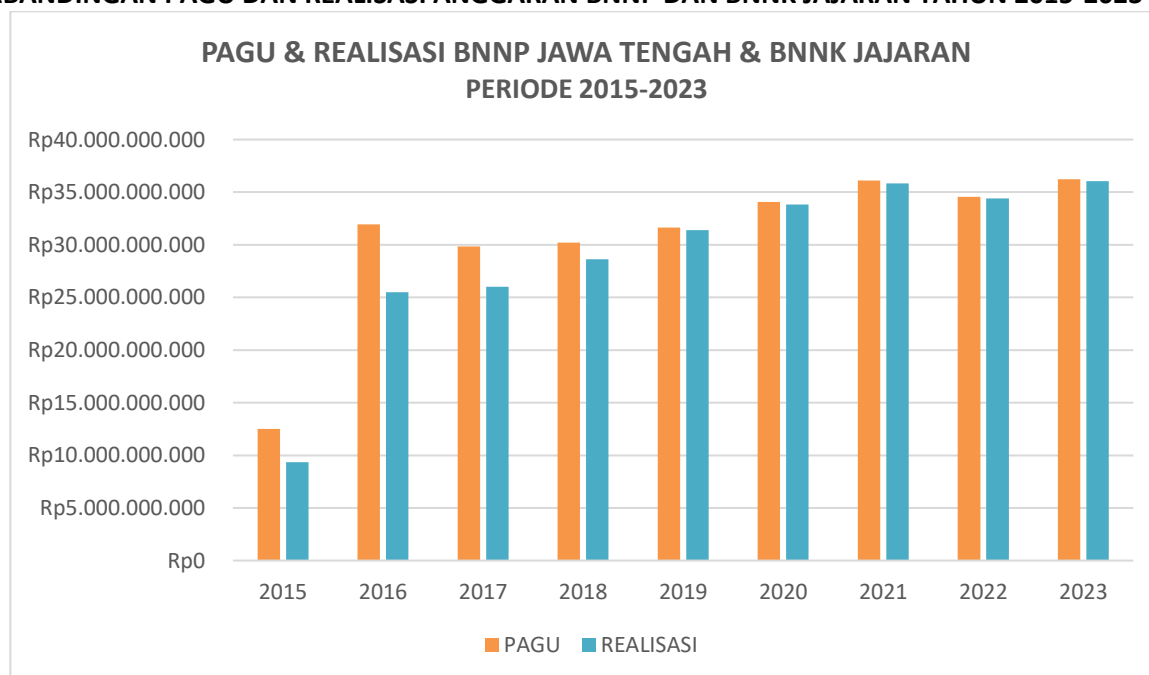
Tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah beserta BNNK jajaran mendapatkan alokasi anggaran (sesuai Pagu Anggaran di Perjanjian Kinerja BNNP Jawa Tengah) sebesar **Rp.36.214.303.000,-** (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran **Rp. 36.043.957.678,-** (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 99,53%.

Tabel 18
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2023

TAHUN	PAGU	REALISASI	%	SISA
2015	Rp 12.506.428.000	Rp 9.338.762.642	74,67	Rp 3.167.665.358
2016	Rp 31.933.874.000	Rp 25.500.844.590	79,86	Rp 6.433.029.410
2017	Rp 29.843.440.000	Rp 26.023.927.726	87,20	Rp 3.819.512.274
2018	Rp 30.192.814.000	Rp 28.636.132.286	94,84	Rp 1.556.681.714
2019	Rp 31.624.745.000	Rp 31.380.817.318	99,23	Rp 243.927.682
2020	Rp 34.057.527.000	Rp 33.817.608.994	99,30	Rp 239.918.006
2021	Rp 36.102.231.000	Rp 35.837.883.168	99,27	Rp 264.347.832
2022	Rp 34.569.055.000	Rp 34.401.700.237	99,51	Rp 167.354.763
2023	Rp 36.214.303.000	Rp 36.043.957.678	99,53	Rp 170.345.332

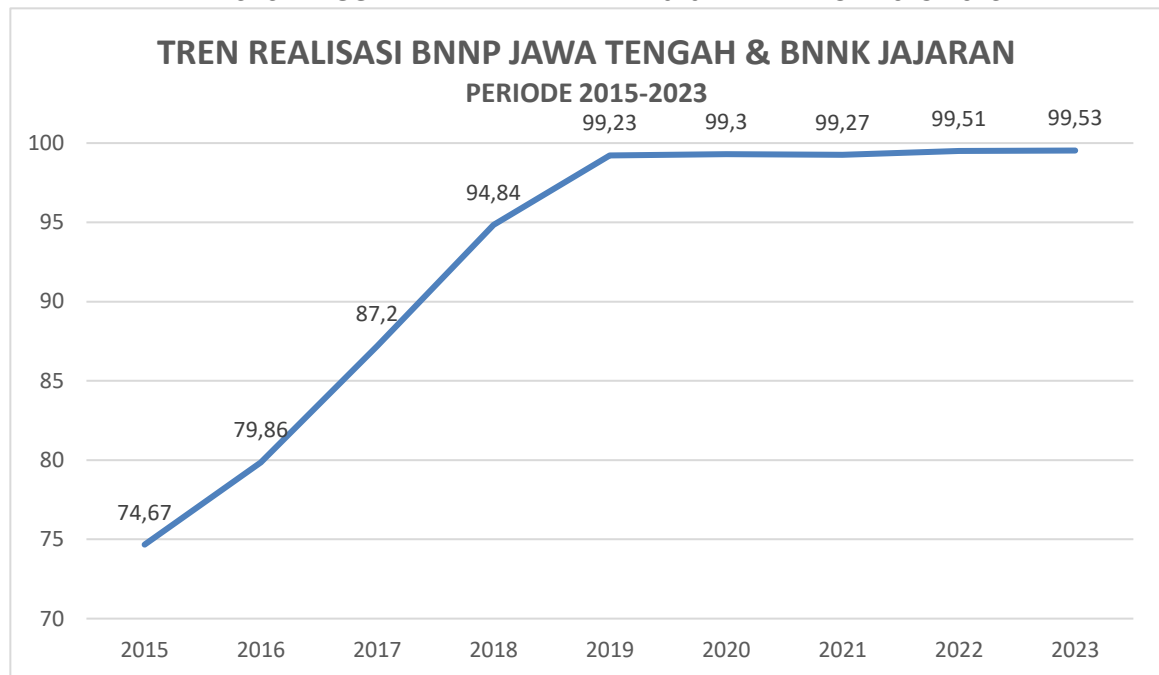
Sejak tahun 2015 hingga 2023 baik secara pagu maupun realisasi anggaran, BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

Tabel 19
PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2023



Jika dilihat dari sudut pandang realisasi secara presentase sejak tahun 2015 hingga 2023 BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya namun mengalami sedikit penurunan seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

Tabel 20
TREN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2023



Selain itu capaian 5 tahun terakhir selalu mencapai di atas 99% melebihi target yang ditetapkan oleh BNN RI dan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi tantangan ke depannya dikarenakan BNNP Jawa Tengah harus bisa mempertahankan capaian tersebut.

Tabel 21
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN PER KEGIATAN

N O	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	854,532,000	853,705,840	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten /Kota	8 Kabupaten /Kota
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	1,010,000,000	1,007,509,448	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten /Kota	9 Kabupaten /Kota
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	1,914,184,000	1,913,167,933	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi	9 Kabupaten /Kota	9 Kabupaten /Kota

N O	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
				berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi		
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	87,610,000	87,608,000	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan
				Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3,25	3,25
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	288,329,000	287,666,641	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100 Orang	112 Orang
				Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	8 Orang	155 Orang
6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1,545,636,000	1,505,583,005	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga
				Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	20 Unit	20 Unit
7	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	192,848,000	190,278,900	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,34 Indeks	3,59 Indeks
8	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	184,432,000	184,432,000	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan preskursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan
9	Kegiatan Penyelidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	971,480,000	970,648,811	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas Perkara	21 Berkas Perkara
10	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	281,613,000	250,023,050	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks
				Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks
11	Kegiatan Penyidikan tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	588,385,000	587,181,090	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2 Berkas Perkara	0 Berkas Perkara
12	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan	14,793,969,000	14,741,642,657	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	82 Indeks	77,87 Indeks

N O	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Pengelolaan Keuangan					
13	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	250,275,000	249,251,758	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten /Kota	8 BNN Kabupaten /Kota
14	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	266,441,000	260,779,337	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	92 Indeks	96,20 Indeks
15	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	12,749,569,000	12,720,445,458	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten /Kota	9 BNN Kabupaten /Kota
16	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	235,000,000	234,033,750			
JUMLAH		36,214,303,000	36,043,957,678			

BAB IV PENUTUP

BNN Provinsi Jawa Tengah secara umum telah melaksanakan target kinerja selama tahun 2023 dan disampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2032 yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BNN RI yang berisi 15 (lima belas) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja, tingkat capaiannya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu:
 - a. Capaian **melebihi target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	180%
2	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	113,76%
3	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	112%
4		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	187,5%
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	107,48%
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	105%
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	104,56%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
8	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	100,02%

b. Capaian **sesuai target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 10 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	100%
2	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	100%
3	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100%
4		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	100%
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	100%
6		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	100%
7	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	100%
8	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%
9		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	100%

c. Capaian yang ***kurang/dibawah dari target*** kinerja yang ditetapkan sebanyak 3 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkobaS	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	0%
2	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	94,96%
3		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	11,11%

2. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Perubahan target kinerja sebagai kebijakan dari pembina fungsi akan diikuti dengan revisi Perjanjian Kinerja.
 - b. Adanya kesempatan yang luas untuk mengikuti pengembangan kapasitas berupa Pendidikan pelatihan/bimtek bagi seluruh personil BNN Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Optimalisasi koordinasi dan Kerjasama ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Peningkatan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Desember 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**


MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI JAWA
TENGAH**


**Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K.,
S.H., M.Hum.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	8 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,25 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100 Orang
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	8 Orang
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	3 Lembaga
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah unit penyelenggara layanan	20 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	layanan rehabilitasi narkoba	rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,34 Indeks
12	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
13	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas Perkara
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
15	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
16	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Berkas Perkara
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	82 Indeks
18	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	9 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
20	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja	9 Kabupaten/Kota
21	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	85 Indeks

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.854.532.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.1.010.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.1.914.184.000 |

4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.87.610.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.288.329.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.1.543.548.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.192.848.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.184.432.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.971.480.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.588.385.000
11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.281.613.000
12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.14.793.969.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.250.275.000
14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.266.441.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.12.749.569.000
16. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.235.000.000

Pihak Kedua, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  MARTINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.	Jakarta, 18 Desember 2023 Pihak Pertama, KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH  Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum.
---	--

LAMPIRAN 2 CAPAIAN DEKTARI BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2023

93	BNNP Jawa Tengah	50	51.02	54.24	51.75	Tinggi	★★★★☆
94	BNN Kabupaten Temanggung	41.2	62.82	54.01	52.67	Tinggi	★★★★☆
.							
95	BNN Kota Tegal	52.53	61.79	55.42	56.58	Sangat Tinggi	★★★★★
96	BNN Kabupaten Banyumas	50	62.46	54.79	55.75	Sangat Tinggi	★★★★★
97	BNN Kabupaten Cilacap	48.48	64.02	52.43	54.98	Sangat Tinggi	★★★★★
98	BNN Kabupaten Kendal	50	64.39	52.96	55.78	Sangat Tinggi	★★★★★
99	BNN Kabupaten Batang	41.2	51.08	53.01	48.43	Rendah	★★★☆☆
100	BNN Kabupaten Purbalingga	50	62.03	54.97	55.67	Sangat Tinggi	★★★★★
101	BNN Kabupaten Magelang	41.2	62.55	54.33	52.69	Tinggi	★★★★☆
102	BNN Kota Surakarta	46.35	51.01	53.02	50.13	Tinggi	★★★★☆

LAMPIRAN 3
CAPAIAN DEKTARA BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2023

93	BNNP JAWA TENGAH	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI
NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN 4 CAPAIAN IKPA BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2023



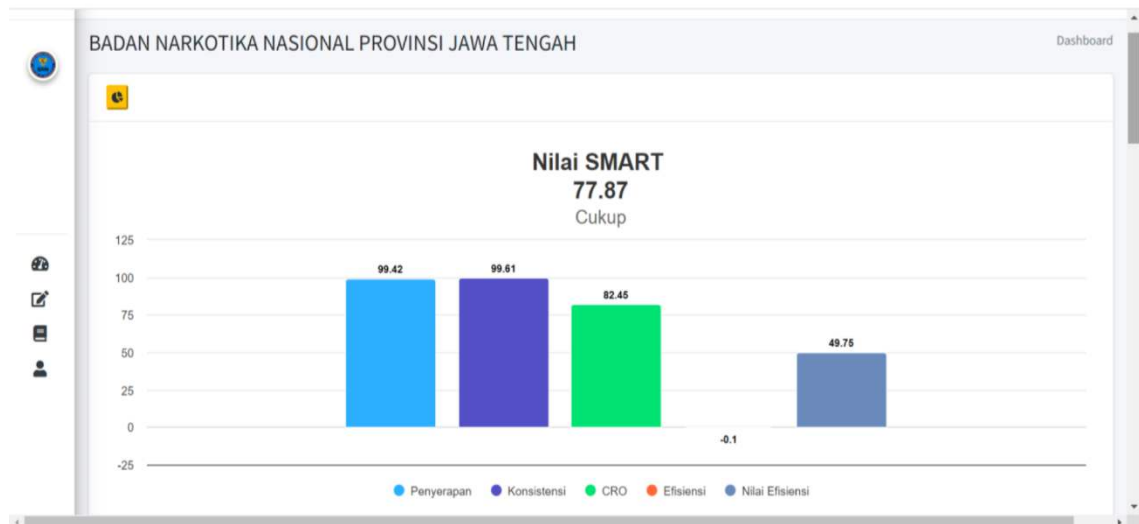
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	134	066	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	65.95	100.00	100.00	100.00	96.01	100.00	100.00	96.20	100%	96.20
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.60	20.00	10.00	10.00	9.60	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.98		99.20					100.00			

LAMPIRAN 5 CAPAIAN NKA BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2023



LAMPIRAN 6 CAPAIAN IKM DAN PROSENTASE KUALITAS HIDUP BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2023

Jawa Tengah	3,57	3,67	83.30
BNN Kabupaten Banyumas	3,28	3,93	90.74
BNN Kabupaten Batang	3,30	3,91	83.62
BNN Kabupaten Cilacap	3,46	3,86	99.19
BNN Kabupaten Kendal	3,33	3,59	89.29
BNN Kabupaten Magelang	3,80	3,69	73.40
BNN Kabupaten Purbalingga	3,70	3,65	77.50
BNN Kabupaten Temanggung	3,50	3,91	90.00
BNN Kota Surakarta	3,62	3,67	83.33
BNN Kota Tegal	3,87	3,46	95.00
BNNP Jawa Tengah	3,80	3,59	71.67

LAMPIRAN 7
CAPAIAN NILAI ZONA INTEGRITAS PENILAIAN INTERNAL
BNNP JAWA TENGAH TAHUN 2023

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	27.11	26.39	36.61	90.11
2	BNNP Nusa Tenggara Barat	25.08	26.76	35.34	87.18
3	BNNP Jawa Timur	26.27	25.38	34.98	86.63
4	BNNP Kalimantan Selatan	24.93	25.43	36.23	86.59
5	BNNP Bali	22.17	26.37	36.73	85.27
6	BNNP Sulawesi Selatan	25.15	24.05	35.98	85.18
7	BNNP Jawa Tengah	24.67	24.43	35.92	85.02
8	BNNP Kalimantan Tengah	23.99	25.53	34.04	83.56
9	BNNP Sumatera Selatan	21.80	24.55	36.61	82.96
10	BNNP Kepulauan Riau	22.77	23.53	35.49	81.79
11	BNNP Jawa Barat	22.78	21.56	37.22	81.56



**BNN PROVINSI
JAWA TENGAH**

Indonesia
bersinar

Subbag Perencanaan BNNP Jawa Tengah 2023

#JatengBersinarPerangiNarkobabarengBareng

@BnnProvJateng | BNN Provinsi Jawa Tengah | BNN PROV JATENG | infobnn_prov_jawatengah | bnn.provinsi.jawatengah